

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten Lamongan

2016



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten Lamongan

2016



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN LAMONGAN 2016

ISBN : -
Katalog BPS : 4102004.3524
No Publikasi : 35245.1705
Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : v + 85

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :
BPS Kabupaten Lamongan

Dicetak oleh :
CV Azka Putra Pratama, Surabaya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dievaluasi terhadap sejumlah indikator yang mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Publikasi "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lamongan 2016" ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang digunakan bersumber dari hasil Susenas, Sakernas, dan hasil Sensus Penduduk.

Hasil pengolahan data dari berbagai sumber tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta indikator kemiskinan dan indikator sosial lainnya.

Kami berharap semoga dengan kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat dan semoga kehadiran publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data secara luas.

Lamongan, Desember 2017
BPS Kabupaten Lamongan
Kepala

Sri Kadarwati, S.Si, M.T.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
.....	
1. Kependudukan	1
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan rasio Jenis kelamin	2
1.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk	5
1.3 Angka Beban Ketergantungan	7
1.4 Fertilitas	9
1.5 Penggunaan Alat Kontrasepsi	10
2. Kesehatan	13
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	14
2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi balita	19
2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	21
3. Pendidikan	25
3.1 Angka Melek Huruf	26
3.2 Rata-rata Lama Sekolah	28
3.3 Tingkat Pendidikan	29
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah	30
3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan	32
4. Ketenagakerjaan	35
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	36
4.2 Tingkat Pengangguran	37
4.3 Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan.....	38

4.4 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	40
4.5 Jumlah Jam Kerja	41
5. Taraf dan Pola Konsumsi	43
5.1 Pengeluaran Rumah Tangga	43
5.2 Konsumsi Energi dan Protein	45
6. Perumahan dan Lingkungan	49
6.1 Kualitas Rumah Tinggal	50
6.2 Fasilitas Rumah Tinggal	51
6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal	53
7. Kemiskinan	55
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Jawa Timur	56
7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	58
7.3 Karakteristik Pendidikan Anggota Rumah Tangga	60
7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan Anggota Rumah Tangga	62
7.5 Karakteristik Perumahan Rumah Tangga	64
8. Sosial Lainnya	67
8.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan	67
8.2 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan	70
8.3 Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	71
8.4 Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha dan Penerima Pelayanan Kesehatan Gratis	72
8.5 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan	75
Lampiran	77



1. KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

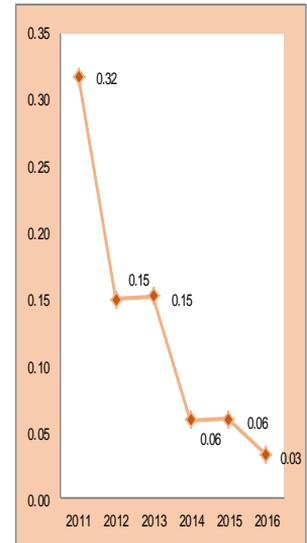
Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi ma-

salah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi sekarang ini dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk Lamongan pada tahun 2016 berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 tercatat sebanyak 1.188.193 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 398 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 yang mencapai 1.187.795 jiwa. Bila dibandingkan dengan enam tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010, jumlah penduduk Lamongan saat ini mengalami peningkatan sekitar 0,77 persen dari jumlah penduduk pada waktu pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 yang sebesar 1.179.059 jiwa. Dengan kata lain, selama kurun waktu enam tahun terakhir jumlah penduduk Lamongan telah mengalami pertambahan penduduk sebesar 9.134 jiwa.

Gambar 1.1
Tingkat Pertumbuhan
Penduduk Lamongan,
Tahun 2011-2016



Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	1.182.808	0,32	94,21
2012	1.184.581	0,15	94,29
2013	1.186.382	0,15	94,43
2014	1.187.084	0,06	94,38
2015	1.187.795	0,06	94,41
2016	1.188.193	0,03	94,44

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Pada periode 2015-2016 laju pertumbuhan penduduk tertingi berada di Kecamatan Brondong dan Paciran, yaitu masing-masing sebesar 1,08 persen dan 1,05 persen. Sementara itu, sebanyak 14 kecamatan mengalami pertumbuhan minus. Kecamatan dengan pertumbuhan minus terbesar terjadi pada Kecamatan Maduran yaitu sebesar -2,10 persen dan Kecamatan Laren yaitu sebesar - 1,72 persen.

**Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
2013-2016**

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sukorame	0.24	0.14	0.13	0.10
2.	Bluluk	0.48	0.38	0.38	0.34
3.	Ngimbang	0.65	0.55	0.55	0.51
4.	Sambeng	0.04	-0.06	-0.06	-0.09
5.	Mantup	0.44	0.34	0.33	0.30
6.	Kembangbahu	0.40	0.29	0.29	0.25
7.	Sugio	-0.06	-0.16	-0.17	-0.20
8.	Kedungpring	-0.47	-0.56	-0.57	-0.60
9.	Modo	-0.01	-0.11	-0.12	-0.15
10.	Babat	-0.15	-0.25	-0.26	-0.29
11.	Pucuk	-0.95	-1.05	-1.05	-1.09
12.	Sukodadi	0.30	0.20	0.19	0.16
13.	Lamongan	1.00	0.90	0.89	0.86
14.	Tikung	0.95	0.85	0.84	0.81
15.	Sarirejo	0.25	0.15	0.14	0.11
16.	Deket	0.60	0.49	0.49	0.46
17.	Glagah	-0.09	-0.19	-0.19	-0.22
18.	Karangbinangun	-0.20	-0.30	-0.30	-0.34
19.	Turi	0.09	-0.02	-0.02	-0.05
20.	Kalitengah	-0.22	-0.31	-0.32	-0.35
21.	Karanggeneng	-0.98	-1.08	-1.09	-1.11
22.	Sekaran	-1.44	-1.54	-1.54	-1.57
23.	Maduran	-1.97	-2.06	-2.07	-2.10
24.	Laren	-1.60	-1.68	-1.69	-1.72
25.	Solokuro	0.76	0.66	0.65	0.62
26.	Paciran	1.19	1.10	1.09	1.05
27.	Brondong	1.22	1.12	1.11	1.08
Jumlah		0.15	0.06	0.06	0.03

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan

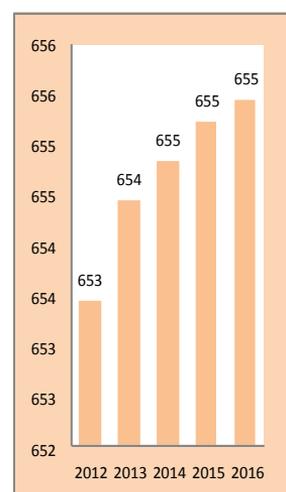
Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Lamongan pada tahun 2016 sebesar 94,44. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 94 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin berdasarkan Kecamatan, dari 27 kecamatan yang ada di Lamongan seluruhnya dibawah angka 100, yaitu berkisar 84,51 di Kecamatan Laren hingga 99,30 di Kecamatan Deket.

Tabel 1.3 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan 2012-2016

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sukorame	96.87	97.01	96.94	96.95	96.97
2.	Bluluk	92.70	92.81	92.74	92.75	92.76
3.	Ngimbang	97.69	97.81	97.74	97.75	97.77
4.	Sambeng	97.11	97.23	97.17	97.18	97.20
5.	Mantup	96.92	97.05	96.99	96.98	97.01
6.	Kembangbahu	98.83	98.97	98.90	98.91	98.93
7.	Sugio	95.45	95.58	95.51	95.52	95.54
8.	Kedungpring	91.99	92.12	92.05	92.06	92.07
9.	Modo	93.40	93.52	93.46	93.47	93.48
10.	Babat	96.67	96.80	96.73	96.74	96.76
11.	Pucuk	92.96	93.08	93.02	93.02	93.05
12.	Sukodadi	93.74	93.87	93.81	93.81	93.83
13.	Lamongan	95.68	95.81	95.74	95.75	95.77
14.	Tikung	97.56	97.69	97.63	97.63	97.65
15.	Sarirejo	97.15	97.26	97.21	97.21	97.22
16.	Deket	99.21	99.34	99.27	99.27	99.30
17.	Glagah	96.67	96.80	96.73	96.74	96.75
18.	Karangbinangun	94.12	94.25	94.19	94.20	94.23
19.	Turi	97.00	97.13	97.06	97.07	97.09
20.	Kalitengah	91.99	92.11	92.05	92.06	92.08
21.	Karanggeneng	89.60	89.72	89.66	89.66	89.68
22.	Sekaran	88.11	88.23	88.17	88.17	88.19
23.	Maduran	86.83	86.94	86.90	86.90	86.91
24.	Laren	84.44	84.55	84.49	84.50	84.51
25.	Solokuro	86.72	86.84	86.78	86.79	86.80
26.	Paciran	93.92	94.05	93.98	94.00	94.01
27.	Brondong	95.04	95.17	95.11	95.11	95.13
Jumlah		94.29	94.43	94.38	94.41	94.44

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan

Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk Lamongan, Tahun 2011 - 2016



Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

1.2. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh berbagai daerah yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Kepadatan penduduk di Lamongan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk walaupun semakin tahun pertumbuhannya semakin melandai. Dalam kurun 5 tahun terakhir kepadatan penduduk Lamongan cenderung tidak terjadi perubahan. Pada Tahun 2012 kepadatan penduduk 653 jiwa per km², meningkat menjadi 654 jiwa per km² pada Tahun 2013 dan naik lagi menjadi 655 km per km² pada Tahun 2014 dan Tahun 2015. Sedangkan pada Tahun 2016 kepadatan penduduk Lamongan masih sekitar 655 jiwa per km².

Bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk menurut kecamatan tahun 2016, kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Paciran yaitu sebesar 2.032 jiwa per km², diikuti Kecamatan Lamongan yaitu sebesar 1.709 jiwa per km² dan Kecamatan Babat dengan kepadatan 1.197 jiwa per km². Sedangkan tiga kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada pada wilayah selatan Lamongan antara lain Kecamatan Sambeng dengan kepadatan 246 jiwa per km², Kecamatan Ngimbang dengan kepadatan 397 jiwa per km² dan Kecamatan Bluluk dengan kepadatan 407 jiwa per km².

Tabel 1.4 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012-2016

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sukorame	489	490	490	491	492
2.	Bluluk	400	402	404	405	407
3.	Ngimbang	388	390	393	395	397
4.	Sambeng	246	246	246	246	246
5.	Mantup	464	466	468	469	471
6.	Kembangbahu	728	731	733	735	737
7.	Sugio	597	597	596	595	593
8.	Kedungpring	591	588	585	582	578
9.	Modo	579	579	578	578	577
10.	Babat	1,208	1,206	1,203	1,200	1,197
11.	Pucuk	855	847	838	829	820
12.	Sukodadi	976	979	981	983	985
13.	Lamongan	1,648	1,665	1,680	1,695	1,709
14.	Tikung	800	807	814	821	828
15.	Sarirejo	478	479	480	481	481
16.	Deket	832	837	841	845	849
17.	Glagah	864	863	862	860	858
18.	Karangbinangun	628	627	625	623	621
19.	Turi	816	816	816	816	816
20.	Kalitengah	692	691	689	686	684
21.	Karanggeneng	700	693	686	678	671
22.	Sekaran	655	645	635	626	616
23.	Maduran	838	822	805	788	772
24.	Laren	368	362	356	350	344
25.	Solokuro	398	401	404	407	409
26.	Paciran	1,945	1,968	1,990	2,011	2,032
27.	Brondong	855	865	875	885	894
Jumlah		653	654	655	655	655

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan

1.3. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2011-2016 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2011 angka beban tanggungan Lamongan sebesar 47,58 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2012 angka beban tanggungan penduduk turun menjadi 45,26 persen dan pada tahun 2013 sebesar 44,85 persen serta tahun 2015 sebesar 44,22 persen. Pada tahun 2016, angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 43,97 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 44 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun

belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang mereka tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Tabel 1.5 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan Lamongan, Tahun 2011-2016

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	25,00	67,76	7,24	47,58
2012	24,71	68,29	7,01	46,45
2013	23,92	68,53	7,55	45,92
2014	24,18	68,12	7,71	46,81
2015	23,00	69,13	7,87	44,65
2016	22,10	69,60	8,30	43,67

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 ada sebanyak 25,00 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) dan turun menjadi 24,71 persen pada tahun 2012. Hingga tahun 2016 proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun menjadi 22,10 persen.

Pada Tabel 1.5 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Lamongan masih didominasi oleh penduduk usia

produktif yang berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 mencapai 67,76 persen pada tahun 2011 dan kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi sebesar 68,29 persen dan kembali meningkat menjadi 69,60 persen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Lamongan menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut 65 tahun ke atas semakin bertambah dari 7,24 persen pada tahun 2011 menjadi 7,55 persen pada tahun 2013 dan 8,30 persen pada tahun 2016.

1.4. Fertilitas

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan penambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban negara semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

Indikator yang digunakan untuk mengukur fertilitas adalah Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*), Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*), Angka Reproduksi Kasar (*Gross Reproductive Rate/GRR*), dan Angka Reproduksi Neto (*Net Reproductive Rate/NRR*). TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita

selama masa usia subur. Indikator TFR mempunyai kegunaan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Berdasar hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, TFR Kabupaten Lamongan sebesar 1,91. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga selesai masa reproduksinya (usia 15-49 tahun) adalah 2 anak.

1.5 Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang

mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

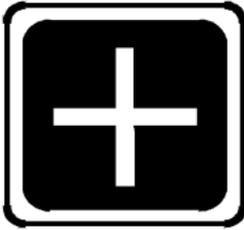
Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2012-2016, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai di atas 60 persen yaitu masing masing sebesar 67,83 persen pada tahun 2012 dan menurun menjadi 61,23 persen pada tahun 2016. Tabel 1.6 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil yang paling banyak diminati. Pada tahun 2012 penggunaan suntikan mencapai 61,06 persen dan meningkat menjadi 73,83 persen pada Tahun 2016. Sementara itu, penggunaan pil justru mengalami penurunan dari 25,96 persen pada Tahun 2012 menjadi 16,61 persen pada Tahun 2016.

Selain alat kontrasepsi suntikan/pil, beberapa alat kontrasepsi lain yang masih sering digunakan adalah MOW/Tubektomi, AKDR/IUD/Spiral, Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit dan cara Tradisional. Pada Tahun 2012 penggunaan MOW/Tubektomi sebesar 1,73 persen dan meningkat menjadi 2,86 persen pada Tahun 2016. Penggunaan AKDR/IUD/Spiral mengalami penurunan dari 2,53 persen Tahun 2012 menjadi 1,07 pada Tahun 2016. Penggunaan Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit juga mengalami penurunan dari 7,55 persen pada Tahun 2012 menjadi sebesar 3,48 persen pada Tahun 2016.

Tabel 1.6 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2012 -2016

Alat/Cara Kontrasepsi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MOW/Tubektomi	1.73	1.99	3.35	2.49	2.86
MOP/Vasektomi	0.51	0.87	0.39	0.13	-
AKDR/IUD/Spiral	2.53	2.21	2.16	2.76	1.07
Suntikan	61.06	63.67	61.26	66.02	73.83
Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit	7.55	5.35	3.08	7.89	3.48
Pil	25.96	28.25	28.37	19.65	16.61
Kondom/Karet	0.51	0.09	0.19	0.71	0.48
Intravag/Tissue/Kondom Wanita	-	-	-	-	-
Cara Tradisional	-	0.43	1.20	0.34	1.67
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	67.83	67.31	62.16	67.47	61.23

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan



2. KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tingkat kesehatan masyarakat antara lain angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) dan usia harapan hidup.

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi dihitung dengan angka 1 (satu) dikurangi angka kematian bayi. Sementara Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah, terutama di sektor kesehatan.

Angka kelangsungan hidup bayi dapat dilihat dari data kematian Per 1000 kelahiran hidup hasil estimasi yang diperbaiki sekitar 969 pada Tahun 2016. Data tersebut memberikan makna bahwa dari 1.000 kelahiran hidup terdapat 969 bayi yang mencapai usia 1 tahun. Sementara angka kematian bayi pada Tahun 2016 diproyeksikan menurun menjadi 30,13 Per 1.000 kelahiran hidup atau turun sekitar 3,0 point pada Tahun 2016. Dengan demikian angka kelangsungan hidup bayi berbanding terbalik dengan angka kematian bayi. Semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang kelangsungan hidup bayi.

Tabel 2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Di Lamongan Tahun 2012 – 2016

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	30.37	30.22	30.16	30.11	30.13
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	969.63	969.78	969.84	969.89	969.87

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Angka Estimasi diperbaiki

Masa kehamilan merupakan masa yang rawan kesehatan, baik kesehatan ibu yang mengandung maupun janin yang dikandungnya sehingga dalam masa kehamilan perlu dilakukan pemeriksaan secara teratur. Hal ini dilakukan guna menghindari gangguan sedini mungkin dari segala sesuatu yang membahayakan terhadap kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Setiap tahunnya diseluruh dunia diperkirakan 4 juta bayi meninggal pada tahun pertama kehidupannya dan dua pertiganya meninggal pada bulan pertama. Penyebab utama kematian pada minggu pertama kehidupan adalah komplikasi kehamilan dan persalinan seperti asfiksia, sepsis, dan komplikasi berat lahir rendah (Depkes RI, 2008).

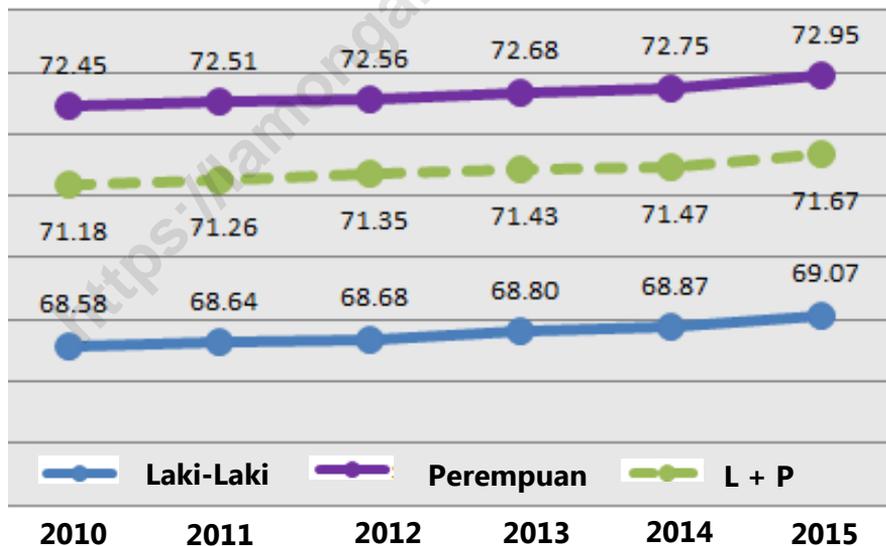
Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*.

Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Penduduk Lamongan Tahun 2010 – 2015



Sumber : BPS Kabupaten Lamongan

Dari hasil penghitungan proyeksi yang dilakukan oleh BPS RI, rata-rata AHH di Lamongan selama 6 tahun terakhir (2010 – 2016) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 71,18 (2010) menjadi 71,73 (2016).

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Tabel 2.2 Angka Kesakitan dan Rata –Rata Lama Sakit Tahun 2012 – 2016

Jenis Kelamin	Angka Kesakitan (%)					Rata - Rata lama Sakit (hari)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Laki-Laki	15.49	17.18	14.86	16.98	16.60	5.48	6.53	6.10	6.07	6.49
Perempuan	17.69	17.41	18.63	18.97	16.00	5.50	5.78	5.52	6.50	5.97
Laki-Laki + Perempuan	16.62	17.3	16.80	18.00	16.29	5.49	6.14	5.77	6.30	6.39

Sumber : Hasil Susenas 2012-2016

Hasil Susenas Tahun 2016 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Lamongan mencapai 16,29 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 18,00 persen. Angka kesakitan penduduk Laki-Laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yaitu sebesar 16,60 persen dan 16,00 persen.

Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Hasil Susenas Tahun 2015 dan 2016 rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 6 hari. Selama Tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa rata-rata lama sakit penduduk di Laki-Laki lebih lama dibandingkan Penduduk Perempuan. Rata-rata lama sakit penduduk Laki-Laki pada Tahun 2015 sekitar 6,07 hari dan meningkat menjadi 6,49 hari pada Tahun 2016. Sedangkan untuk penduduk perempuan rata-rata lama sakit pada tahun 2015 sebanya 6,50 hari menurun menjadi 5,97 pada Tahun 2016. Semakin lamanya kesakitan (jumlah rata-rata hari sakitnya banyak), maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa

Tabel 2.3 Indikator Kesehatan Anak Usia Bawah Dua Tahun, 2012 – 2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (IMR)	30.33	30.22	30.16	30.11	30.13
Angka Harapan Hidup (AHH)	71.35	71.43	71.47	71.67	71.73
Persentase Anak Baduta Yang Pernah Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI)	93.19	93.67	95.30	95.97	98.81
Rata-Rata Lamanya Pemberian ASI pada Anak Baduta (Bulan)	9.38	9.87	9.82	10.07	10.38

Sumber : Hasil Susenas 2012-2016

menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Dianjurkan seorang ibu dapat menyusui bayinya selama 2 tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan kekebalan/proteksi yang lebih kuat. Bila dilihat rata-rata lama bayi disusui pada tahun 2015 dan 2016 sama yaitu sekitar 10 bulan.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang diseki-

Tabel 2.4 Persentase Anak Umur 12-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, Tahun 2012 – 2016

Jenis Imunisasi.	2012	2013	2014	2015	2016
BCG	99.15	99.81	98.57	99.41	96.89
DPT	83.96	90.78	93.61	86.58	95.85
Polio	85.41	89.35	62.49	90.99	95.33
Campak	98.33	98.73	98.59	90.77	92.74
Hepatitis B	82.76	83.65	88.35	84.34	94.30

Sumber : Hasil Susenas 2012-2016

tarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Berdasarkan hasil Susenas 2012 - 2016, mayoritas anak umur 12 -59 bulan yang mendapatkan imunisasi wajib sudah mencapai lebih dari 80 persen. Capaian jenis imunisasi yang paling rendah adalah Hepatitis B, yaitu pada kisaran 80 - 90 persen. Pada umumnya persentase anak umur 12-59 bulan yang pernah diimunisasi pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Persentase anak umur 12-59 bulan yang pernah di imunisasi BCG pada tahun 2012 sebesar 99,15 persen mengalami penurunan menjadi sebesar 96,89 persen pada tahun 2016. Kemudian persentase anak umur 12-59 bulan yang pernah di imuisasi DPT pada tahun 2012 sebesar 83,96 persen meningkat menjadi sebesar 95,85 persen pada tahun 2016. Persentase anak umur 12-59 bulan yang pernah di imunisasi Polio pada tahun 2012 sebesar 85,41 persen meningkat menjadi sebesar 95,33 persen pada tahun 2016. Persentase anak umur 12-59 bulan yang pernah di imunisasi Campak pada tahun 2012 sebesar 98,33 persen menurun menjadi sebesar 92,74 persen pada tahun 2016.

2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan

proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan ke-

bidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 98,32 persen pada tahun 2012 menjadi 100 persen di tahun 2016. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya peran dokter sebagai penolong persalinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Namun demikian penolong persalinan yang dilakukan oleh bidan masih mendominasi walaupun mengalami penurunan selama tahun 2012-2016 dari 82,15 persen menjadi 49,11 persen. Penolong persalinan oleh dukun tradisional terjadi terutama di daerah perdesaan, persentasenya terus menurun setiap tahun dari 1,77 persen pada tahun 2012, dan sejak Tahun 2014 sudah tidak ada lagi yang ditolong oleh dukun tradisional.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Dampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dengan penduduk perkotaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri.

Tingginya persentase penduduk di daerah perkotaan yang memanfaatkan berobat fasilitas kesehatan mengingat lebih mudahnya akses dan kualitas pelayanannya jauh lebih baik dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Sebagai dam-

paknya, akan terlihat berbagai keluhan dan masalah kesehatan segera tertangani lebih cepat dan lebih baik.

Peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik tersebut ditandai dengan banyaknya penduduk di perkotaan maupun di perdesaan yang berobat ke tenaga kesehatan. Pada tahun 2016

Tabel 2.5 Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan, Tahun 2012 – 2016

Penolong Kelahiran	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dokter	16.08	25.70	29.28	44.33	49.94
Bidan	82.15	71.92	70.72	52.04	49.11
Tenaga Kesehatan Lain	0.00	0.00	0.00	3.63	0.94
Dukun Tradisional	1.77	2.38	0.00	0.00	0.00
Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Hasil Susenas 2012-2016

penduduk yang berobat jalan ke petugas kesehatan sebesar 61,42 persen, naik dibandingkan dengan Tahun 2012 sebesar 55,99 persen. Puskesmas merupakan alternatif kedua tempat berobat, pada tahun 2012 sebesar 12,22 persen meningkat menjadi sebesar 18,49 persen 2016. Hal ini karena kedua fasilitas pelayanan kesehatan tersebut yang mudah dijangkau dan yang tersedia baik di seluruh kecamatan. Tempat rujukan berobat praktek dokter/klinik tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012 sebesar 15,42 persen menjadi sebesar 6,82 persen tahun 2016. Sebaliknya terjadi peningkatan penduduk yang memanfaatkan berobat ke rumah sakit dari 9,18 persen pada tahun 2012 menjadi 10,86 persen pada tahun 2016.

Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, Tahun 2012 – 2016

Tempat Berobat	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Sakit	9.18	4.47	4.79	13.01	10.86
Klinik/Praktek Dokter	15.42	20.31	15.11	10.38	6.82
Puskesmas	12.22	15.30	23.32	15.90	18.49
Petugas Kesehatan	55.99	40.70	58.19	57.69	61.42
Pengobatan Tradisional	3.04	1.12	1.94	1.05	1.84
Dukun Bersalin	4.16	0.56	1.72	6.37	2.05

Sumber : Hasil Susenas 2012-2016



3. PENDIDIKAN

Di era globalisasi modern saat ini, perkembangan di segala bidang keilmuan semakin pesat. Dari berbagai perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian para ilmuwan adalah mengenai konsep pembangunan. Paradigma baru mengenai konsep pembangunan ini dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan era sebelum tahun 1970-an yang menitikberatkan pembangunan hanya pada pertumbuhan ekonomi saja. Namun, pada kenyataannya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dipandang dari aspek ekonomi saja, tetapi juga dari aspek sosial lainnya, salah satunya adalah aspek pendidikan.

Pendidikan merupakan cikal bakal dari terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal. Dengan pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara di mata dunia internasional.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan telah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan pendidikan di Indonesia sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia lanjut.

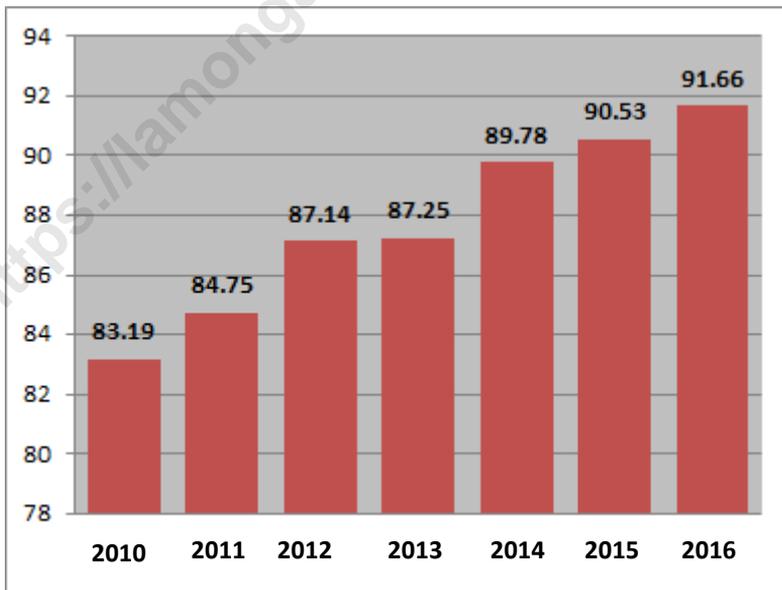
Memasuki tahun era tahun 1990-an, pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan melalui pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang ditunjang dengan program kejar paket. Dan sebagai tindak lanjut

dari keseriusan pemerintah di bidang pendidikan, maka diterbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bahwa anggaran pendidikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari total anggaran belanja.

Pembahasan mengenai indikator bidang pendidikan di Kabupaten Lamongan menjadi penting untuk melihat sejauh mana capaian di bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembahasan tersebut akan difokuskan pada indikator capaian di bidang pendidikan seperti angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi sekolah. Sedangkan indikator tantangan di bidang pendidikan akan difokuskan pada kualitas pelayanan pendidikan, serta angka putus sekolah dan angka mengulang.

3.1 Angka Melek Huruf

Gambar 3.1. Angka Melek Huruf Tahun 2010—2016 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

Secara harfiah, angka buta huruf merupakan suatu ukuran persentase penduduk usia sepuluh (10) tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis yakni diartikan dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana atau dapat membaca dan menulis huruf Braile.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka buta huruf di Lamongan tahun 2016 mencapai 8,34 persen. Dari penduduk usia di atas 10 tahun, sekitar 8,34 persen belum bisa membaca dan menulis. Terbanyak adalah kelompok usia di atas 55 tahun, penduduk tua yang dahulu belum punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

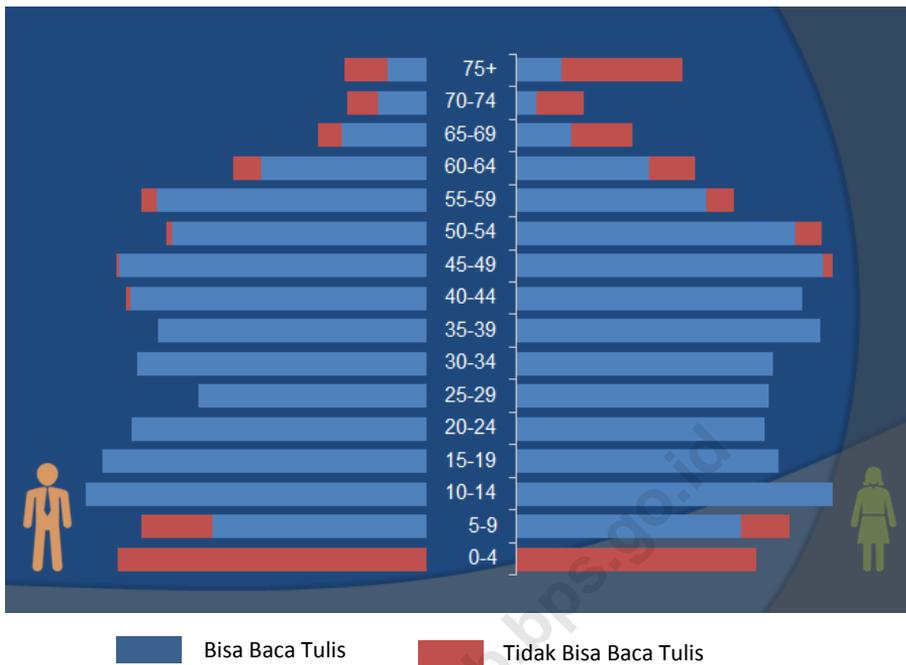
Dalam kurun 15 tahun terakhir angka buta huruf mengalami penurunan hampir separuhnya, yaitu dari 16,81 persen pada Tahun 2000 menjadi 8,34 persen pada Tahun 2016. Angka buta huruf perempuan masih lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Angka buta huruf perempuan pada Tahun 2016 sebesar 11,36 persen sedangkan laki-laki hanya 5,08 persen.

Gambar 3.2. Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Lamongan, 2000-2016 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

Gambar 3.3. Piramida Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Kabupaten Lamongan, 2016



Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

3.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Lamongan tahun 2016 mencapai 7,29 tahun, artinya bahwa secara rata-rata penduduk Lamongan yang berusia 15 tahun ke atas mengenyam bangku pendidikan sekolah selama 7,29 tahun atau setara dengan kelas VII tingkat SMP. Tentunya capaian ini masih dibawah target pemerintah dengan program wajib belajar 9 tahunnya. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2015, rata-rata lama sekolah Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan dari 7,28 tahun pada 2015 menjadi 7,29 tahun pada 2016.

Tabel 3.4. Rata-rata Lama Sekolah di Lamongan Tahun 2010-2016 (Tahun)



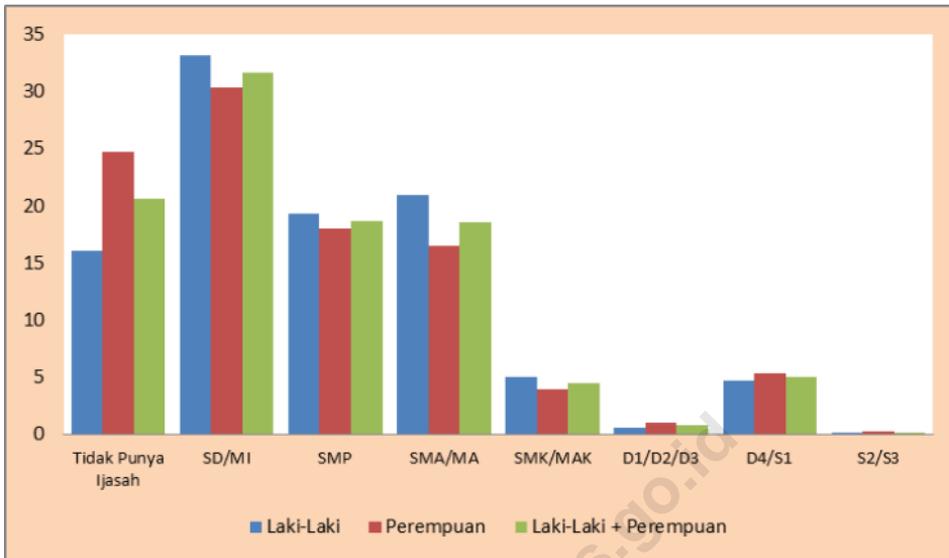
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

3.3 Tingkat Pendidikan

Secara umum, tingkat pendidikan di Kabupaten Lamongan tidak begitu tinggi. Persentase penduduk Lamongan usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 20,56 persen, tamat sekolah dasar (SD) atau sederajatnya sebesar 31,68 persen dan tamat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 18,67 persen. Dengan demikian, sebanyak 70,91 persen penduduk Kabupaten Lamongan usia 15 tahun ke atas hanya tamatan SMP ke bawah.

Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat sekolah menengah atas (SMA) ke atas hanya 29,09 persen yang terdiri dari tamat SMA atau sederajatnya sebesar 23,10 persen, sedangkan tamat diploma (D1/D3) dan tamat sarjana ke atas (S1/D4/S2/S3) masing-masing sebesar 0,8 persen dan 5,19 persen.

Gambar 3.5. Persentase Penduduk Lamongan Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016



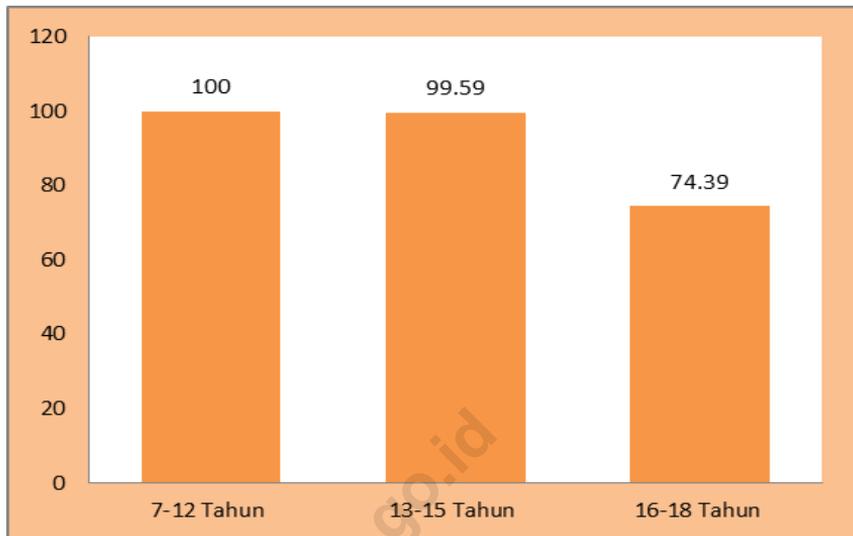
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui capaian di bidang pendidikan, salah satunya dengan melihat tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Indikator yang digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi sekolah diantaranya adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM).

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam bangku pendidikan.

Gambar 3.6. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lamongan Menurut Kelompok Usia, 2016



Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

Secara umum, APS Lamongan per masing-masing kelompok usia sekolah ditunjukkan pada gambar 3.6. APS kelompok usia 7-12 tahun Lamongan tahun 2016 sebesar 100 yang berarti bahwa 100 persen penduduk Lamongan usia 7-12 tahun mengenyam pendidikan di sekolah (tanpa memandang tingkatan sekolahnya). APS kelompok usia 13-15 tahun Lamongan tahun 2016 sebesar 99,59 lebih rendah dari APS kelompok usia 7-12 tahun. Interpretasinya sama dengan sebelumnya, bahwa penduduk Lamongan usia 13-15 tahun 99,59 persen memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah. Sementara itu, APS kelompok usia 16-18 tahun Lamongan tahun 2016 sebesar 74,39 persen. Angka ini lebih kecil lagi dibandingkan APS kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 25 persen penduduk Lamongan usia 16-18 tahun tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan SMP.

3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerus generasi bangsa. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan di Indonesia.

Pengukuran kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio murid/guru, rasio guru/sekolah dan rasio murid/kelas. Rasio tersebut untuk melihat seberapa memadai fasilitas sekolah (sekolah/kelas/guru) yang disediakan untuk memenuhi permintaan jasa pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan di atas.

Rasio murid/guru menurut jenjang pendidikan di Lamongan selama 4 tahun terakhir mengalami perbaikan. Hal tersebut tampak jelas pada tabel 3.1. bahwa secara besaran angka rasio murid/guru semakin kecil. Rasio murid/guru diartikan sebagai banyaknya murid yang dibimbing oleh satu guru. Semakin kecil rasio murid/guru maka semakin sedikit murid yang dibimbing oleh guru, dengan demikian diharapkan transfer ilmu dari guru pada anak didiknya semakin baik dan kualitas pelayanan pendidikan semakin bagus.

Umumnya kabupaten/kota besar mempunyai rasio murid/guru lebih tinggi dibandingkan lainnya. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh tingginya permintaan jasa pendidikan di kota besar tidak diimbangi dengan tenaga pendidiknya. Namun demikian secara umum jumlah guru di Lamongan cukup memadai.

Tabel 3.1. Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lamongan, 2016

Uraian	Rasio Murid/Guru	Rasio Guru/ Sekolah	Rasio Murid/ Kelas
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	8.34	11.03	8.51
SMP	7.66	22.97	24.86
SMA	9.95	23.89	26.83

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Selain rasio murid/guru, indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan adalah rasio murid/sekolah. Rasio murid/sekolah menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung peserta didik. Selain hal tersebut diatas, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan tidak hanya didorong oleh penambahan jumlah guru dan unit sekolah (faktor input) saja, namun yang perlu menjadi perhatian adalah keseluruhan sistem pendidikan. Sebuah sistem mengandung rangkaian kegiatan mulai dari input, proses, output serta faktor internal dan eksternal, dimana masing-masing komponen/kegiatan tersebut mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai tujuan utama sistem tersebut.



4. KETENAGAKERJAAN

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat menjadi sasaran pembangunan ideal suatu daerah.

Disinilah letak isu pentingnya faktor ketenagakerjaan itu berperan dalam sebuah aktifitas bisnis dan perekonomian unggulan Lamongan. Ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan strategi dan langkah tepat untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Karena itu pentingnya data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam pengambil kebijakan yang tepat sasaran.

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai beberapa indikator tenaga kerja yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahun 2012-2016. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha dan

jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah, gaji/ pendapatan bersih.

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penduduk yang menganggur. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/ usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/ wilayah serta besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

Tabel 4.1 Penduduk Lamongan Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Tahun 2014 - 2016

Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkatan Kerja (AK)	Orang	611 621	633 048	621 196
* Bekerja	Orang	585 311	607 096	599 071
* Penganggur	Orang	26 310	25 952	22 125
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,64	68,63	67,11
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,30	4,10	3,56
Pekerja Tidak Penuh	Ribu Orang	231,24	230,73	207,68
* Setengah Penganggur	%	14,96	18,25	12,27
* Paruh Waktu	%	85,04	81,75	87,73

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja) yang masuk dalam pasar kerja, baik yang statusnya bekerja maupun penganggur. Indikator ini disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memperlihatkan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi serta menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. Meningkatnya TPT menunjukkan adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau menunjukkan bahwa kecepatan laju pertumbuhan kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

Berdasarkan dari hasil Sakernas 2011-2016, TPAK dan TPT Lamongan tahun 2011-2016 sangat berfluktuatif. TPAK cenderung mengalami penurunan yang dibarengi TPT yang cenderung naik. Perlu perhatian serius dalam bidang ketenagakerjaan karena kondisi tersebut menggambarkan bahwa berkurangnya penduduk yang aktif dalam bursa kerja namun tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja sehingga pengangguran juga meningkat.

Pada Tahun 2016 terjadi penurunan TPT di Kabupaten Lamongan sebesar 0,54 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari 4,10 persen di tahun 2015 menjadi 3,56 persen tahun 2016. Angka TPT yang mengalami penurunan mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat yang bekerja dan mempunyai pendapatan semakin bertambah dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kata lain terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4.3. Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan

Mendapatkan pekerjaan yang layak tentunya diharapkan oleh setiap orang. Salah satu usaha untuk mendapatkan kesempatan itu adalah dengan pendidikan tinggi yang ditamatkan. Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan di lapangan usaha serta keterbatasan ketersediaan lapangan usaha, sebagian orang berusaha dengan meningkatkan kualitas ketrampilan yang dimiliki. Namun seiring dengan kondisi tersebut muncul permasalahan yaitu lulusan pendidikan tinggi masih banyak yang tidak terserap pada lapangan usaha tersebut, salah satunya disebabkan karena sebagian besar lulusan tinggi cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Jumlah pengangguran di Kabupaten Lamongan pada tahun

2016 adalah 22,13 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,56 persen. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, yang semula pengangguran berjumlah 25,95 ribu orang, atau berkurang 3,83 ribu orang dengan TPT sebesar 4,10 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5-6 persen yang tercipta selama 2011-2016 di Kabupaten Lamongan, berkontribusi mengurangi rata-rata 2,70 ribu orang pengangguran setiap tahunnya.

Bila dilihat menurut jenjang pendidikan, karakteristik pengangguran di Kabupaten Lamongan 2016 didominasi oleh penduduk berpendidikan SMA. Situasi ini mulai terjadi sejak 2015, dimana semula (2011-2014) TPT penduduk berpendidikan SMK selalu yang tertinggi. Kondisi ini dapat menjadi indikasi bahwa, bila semula lulusan SMK ditengarai menjadi surplus pengangguran (sejalan data ketenagakerjaan periode sebelumnya yang selalu dominan penyumbang TPT), maka terjadi perbaikan kondisi, terutama dalam penyerapan lulusannya di dunia kerja. Kuat dugaan, hasil data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama ini direspon dengan peningkatan mutu serta upaya link and match antara kebutuhan

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2011-2016

Pendidikan Tertinggi yang Ditematkan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD Kebawah	1,28	2,60	0,52	0,89	0,98	0,78
SMP	10,45	5,62	4,69	2,73	2,12	4,28
SMA	10,24	6,92	10,16	9,06	11,50	7,92
SMK	19,16	15,09	24,72	25,47	7,73	4,72
Perguruan Tinggi	20,87	10,54	14,66	1,20	17,26	4,26
TPT Kab. Lamongan	6,14	4,75	4,93	4,30	4,10	3,56

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

dunia kerja dengan kemampuan yang relevan lulusan SMK di Kabupaten Lamongan. Melihat kondisi ini, maka wacana kebijakan Pemerintah di lingkungan Provinsi Jawa Timur, mengenai moratorium sekolah SMA dan peningkatan sekolah SMK sangat relevan, terutama dalam mendukung kebijakan Pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja.

4.4. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Tiga besar struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Lamongan tahun 2016 masih belum mengalami perubahan, dari yang terbesar berturut-turut adalah pertanian, perdagangan, dan industri. Jika selama 2011-2012, sektor pertanian menyerap lebih dari separuh tenaga kerja di Kabupaten Lamongan, kondisi ini mulai mengalami pergeseran selama 2013-2016.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Kelompok Lapangan Pekerjaan Utama (ribu orang), Tahun 2011-2016

Lapangan Pekerjaan Utama	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	287,77	296,86	287,75	260,90	287,36	282,27
Industri	42,11	37,48	44,00	38,58	66,20	75,99
Konstruksi	22,66	29,32	19,42	33,52	31,41	41,37
Perdagangan	119,14	130,36	135,66	134,40	122,34	107,55
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	11,82	11,08	12,73	16,54	18,05	19,26
Keuangan	5,41	8,48	6,79	8,26	9,11	9,13
Jasa Kemasyarakatan/ Perorangan dan Lainnya	55,73	78,53	106,10	93,11	72,63	63,49
Jumlah	544,62	592,10	612,45	585,31	607,10	599,07

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

Dalam periode Agustus 2015-Agustus 2016 penambahan penyerapan jumlah tenaga kerja terbesar terjadi di sektor Konstruksi sebanyak 9,97 ribu orang (31,74 persen), diikuti sektor Industri sebanyak 9,79 ribu orang (14,79 persen), serta sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebanyak 1,22 ribu orang (6,74 persen). Sementara itu tiga besar sektor lapangan pekerjaan yang mengalami pengurangan penyerapan tenaga kerja adalah sektor Perdagangan sebanyak 14,79 ribu orang (turun 12,09 persen), Jasa Kemasyarakatan/Perorangan sebanyak 8,17 ribu orang (Turun 11,48 persen) serta Pertanian sebanyak 5,09 ribu orang (turun 5,09 persen).

4.5. Jumlah Jam Kerja

Tingkat produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Lamongan semakin meningkat selama 2011-2016, terutama bila dilihat dari jumlah jam kerja selama seminggu. Ditandai dengan semakin berkurangnya penduduk dengan jam kerja kurang dari 35 jam ker-

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Jumlah Jam Kerja per Minggu (ribu orang), Tahun 2011-2016

Jumlah Jam Kerja per Minggu	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1-7	9,75	11,83	10,19	6,88	6,50	5,95
8-14	44,26	45,70	38,06	22,04	28,49	24,83
15-24	105,36	114,23	90,70	89,89	93,09	76,45
25-34	104,28	116,40	94,35	112,43	102,64	100,45
1-34	263,64	288,16	233,31	231,24	230,73	207,68
≥35 ⁴	280,98	303,94	379,14	354,08	376,37	391,39
Jumlah	544,62	592,10	612,45	585,31	607,10	599,07

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

ja seminggu (pekerja tidak penuh), dari 263,64 ribu orang tahun 2011 menjadi 207,68 ribu orang di tahun 2016 atau berkurang 55,97 ribu orang. Dari sisi jumlah, penurunan terbesar terjadi pada kelompok tenaga kerja dengan rata-rata tiga jam kerja per hari (berkurang 28,91 ribu orang) serta kelompok tenaga kerja dengan rata-rata dua jam kerja perhari (berkurang 19,42 ribu orang).

Sehingga pada 2016, rata-rata 35 dari seratus tenaga kerja yang memiliki tenaga kerja tidak penuh, atau berkurang 13 orang dibanding kondisi tahun 2011 (48 orang dari seratus tenaga kerja memiliki jam kerja tidak penuh). Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja dengan rata-rata jam kerja lima jam atau lebih perhari (35 jam kerja seminggu atau lebih), selama 2011-2016, sebesar 39,30 persen atau bertambah sebanyak 110,42 ribu orang.

Kecenderungan penurunan tenaga kerja yang memiliki jam kerja tidak penuh di Kabupaten Lamongan, terutama pada penduduk laki-laki. Bila pada tahun 2011, empat dari sepuluh tenaga kerja laki-laki memiliki jam kerja kurang dari 35 jam kerja seminggu, maka pada tahun 2016 tersisa dua dari 10 orang tenaga kerja laki-laki. Jika pada tenaga kerja laki-laki terjadi penurunan tajam untuk pekerja dengan jam kerja tidak penuh, tidak demikian halnya untuk tenaga kerja perempuan. Namun keduanya memiliki kecenderungan yang sama, yaitu menurun.



5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi masyarakat menunjukkan suatu hasrat masyarakat untuk mengkonsumsi barang maupun jasa. Hasrat untuk mengkonsumsi dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan mereka yang dialokasikan untuk konsumsi. Bisa diartikan bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya, semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pola konsumsi menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan kedalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. Struktur konsumsi masyarakat Lamongan mulai mengalami perkembangan, sebagian besar pengeluaran konsumsinya tidak lagi untuk konsumsi makanan tetapi untuk konsumsi bukan makanan. Pergeseran pola konsumsi ini dipengaruhi oleh perubahan pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran (persen), Tahun 2009 - 2016

Tahun	Pengeluaran Perkapita Sebulan					
	Rangkuman (Dalam Rupiah)			Persentase		
	Pengeluaran Makanan	Pengeluaran Non Makanan	Jumlah	Pengeluaran Makanan	Pengeluaran Non Makanan	Jumlah
2009	190 162	141 878	332 040	57.27	42.73	100
2010	203 884	141 616	345 500	59.01	40.99	100
2011	245 609	211 199	456 808	53.77	46.23	100
2012	261 951	230 542	492 493	53.19	46.81	100
2013	312 287	322 329	634 616	49.21	50.79	100
2014	343 480	336 631	680 110	50.50	49.50	100
2015	388 280	439 799	828 079	46.89	53.11	100
2016	438 316	428 019	866 335	50.59	49.41	100

Sumber: Susenas, 2009-2016

konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Gambaran konsumsi masyarakat dapat dilihat pada tabel 5.1, selama 2009-2016 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 332.040,- menjadi Rp 866.335,-. Dimana pada tahun 2009 sekitar Rp. 190.162,- atau 57,27 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan, sedangkan Rp. 141.878,- atau 42.73 persen dikeluarkan untuk konsumsi bukan makanan. Pada Tahun 2016 sekitar Rp. 438.316,- atau 50,59 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan dan Rp. 428.019,- atau 49,41 persen untuk konsumsi bukan makanan. Dilihat dari persentase tersebut pengeluaran untuk makanan justru mengalami penurunan dan sebaliknya pengeluaran bukan makanan meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi penghasilan rumah tangga maka semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan.

Sementara itu, rata-rata pengeluaran untuk makanan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu Rp. 438.316,- per kapita sebulan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 388.280,- per kapita sebulan, atau naik sebesar 12,89 persen.

Sebaliknya untuk pengeluaran makanan hampir semua mengalami penurunan kecuali umbi-umbian, daging, sayur-sayuran, makanan dan minuman jadi, dan Tembakau dan sirih dari masing-masing 0,16; 1,90; 3,41; 12,60; dan 6,07 menjadi 0,24; 1,99; 3,49; 15,46; dan 7,26.

Jenis Pengeluaran makanan yang tertinggi adalah padi-padian, makanan dan minuman jadi, dan tembakau dan sirih yaitu besarnya lebih dari 5 persen, sedangkan konsumsi makanan lainnya persentasenya sangat kecil yaitu kurang dari 5 persen. Sedangkan untuk konsumsi non makanan yang tertinggi adalah konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 22,29 persen. Yang tertinggi kedua dan ketiga adalah aneka barang dan jasa dan barang tahan lama yaitu masing-masing sebesar 12,09 persen dan 7,45 persen.

5.2. Konsumsi Energi dan Protein

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi energi dan protein. Jumlah konsumsi energi dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan

yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kilo kalori dan 57 gram protein per hari.

Selama periode 2015-2016 penduduk Lamongan mengalami peningkatan konsumsi energi/kalori per hari sebesar 130,91 kkal. Pada tahun 2015 penduduk Lamongan hanya mampu mengkon-

Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Perbulan Menurut Jenis Pengeluaran (persen), Tahun 2012-2016

Jenis Pengeluaran Makanan	2012	2013	2014	2015	2016
Padi-padian	10.33	8.60	8.28	8.07	6.85
Umbi-umbian	0.16	0.17	0.15	0.16	0.24
Ikan	4.94	5.10	5.32	4.61	4.19
Daging	1.90	1.68	1.76	2.08	1.99
Telur dan Susu	2.79	2.51	2.72	2.61	2.67
Sayur-sayuran	3.41	3.57	3.10	2.93	3.49
Kacang-kacangan	2.01	1.83	1.68	1.42	1.36
Buah-buahan	2.33	2.02	2.35	2.06	1.90
Minyak dan Lemak	2.06	1.78	1.73	1.65	1.50
Bahan Minuman	2.14	1.86	1.73	1.61	1.56
Bumbu-Bumbuan	1.47	1.23	1.24	1.05	1.16
Konsumsi Lainnya	0.99	0.87	0.86	0.95	0.97
Makanan dan Minuman Jadi	12.60	12.28	13.23	11.71	15.46
Tembakau dan Sirih	6.07	5.73	6.37	5.98	7.26
Jumlah Makanan	53.19	49.21	50.50	46.89	50.59
Perumahan Dan Fasilitas Rumah Tangga	16.05	14.31	16.29	23.73	22.29
Aneka Barang Dan Jasa	20.41	19.75	21.50	13.78	12.09
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	3.71	3.40	3.46	3.01	3.23
Barang Tahan Lama	3.93	10.86	5.81	6.49	7.45
Pajak dan Asuransi	1.56	1.56	1.59	2.46	2.22
Keperluan Pesta dan Upacara	1.15	0.91	0.85	3.65	2.12
Jumlah Non Makanan	46.81	50.79	49.50	53.11	49.41

Sumber: Susenas, 2012-2016

sumsi energi/kalori rata-rata per hari hanya sebesar 2.019,69 kkal dan tahun 2016 menjadi 2.150,60 kkal, sedikit lebih tinggi dari tahun 2015. Ini berarti konsumsi energi per hari penduduk Lamongan di tahun 2015 masih belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan yaitu sebesar 2.150 kkal. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita per hari penduduk Lamongan juga masih relatif kecil, yaitu dari 61,75 gram pada tahun 2015 dan naik 3,62 gram menjadi 65,37 gram pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi protein Kabupaten Lamongan memenuhi kecukupan protein yang disyaratkan yaitu 57 gram. Rata-rata konsumsi protein Lamongan juga diatas rata-rata Jawa Timur yang masih kurang dari standart kecukupan protein yang disyaratkan.

Rata-rata konsumsi energi menurut daerah tempat tinggal terlihat bahwa penduduk di perkotaan selama kurun waktu 2015-2016 meningkat, yaitu 2.016,24 pada tahun 2015 dan naik menjadi

Tabel 5.3. Rata-Rata Konsumsi Energi (kkal) dan Protein (gram) per Kapita Sehari Menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2015 - 2016

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Energi (kkal)			
2015	2016,24	2021,09	2019,69
2016	2202,22	2130,36	2150,60
Protein (gram)			
2015	62,89	61,30	61,75
2016	67,56	64,50	65,37

Sumber: Susenas, 2015-2016

2.202,22 pada tahun 2016. Namun konsumsi energi di daerah perdesaan tahun 2015 lebih tinggi dari konsumsi energi di perkotaan yaitu sebesar 2.021,09 kkal, akan tetapi pada tahun 2016 lebih tinggi di daerah perkotaan yaitu 2.130,36 kkal. Sedangkan konsumsi protein penduduk di perkotaan lebih tinggi jika dibandingkan penduduk di daerah perdesaan. Pada tahun 2015 rata-rata konsumsi protein penduduk perkotaan sebanyak 62,89 gram, kemudian naik 4,67 gram menjadi 67,56 gram pada tahun 2016. Sedangkan penduduk perdesaan rata-rata hanya mengonsumsi protein sebanyak 61,30 gram pada tahun 2015 dan hanya naik 3,2 gram menjadi 64,50 gram pada tahun 2016. Kecukupan konsumsi energi dan protein bagi penduduk perkotaan maupun penduduk perdesaan sudah di atas dari rata-rata kecukupan energi dan protein yang dianjurkan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan di Lamongan sudah memperhatikan akan kebutuhan asupan energi dan protein yang dibutuhkan bagi anggota keluarganya dan kesehatan tubuh.



6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah adanya rumah tinggal. Selain merupakan kebutuhan yang mendasar, rumah tinggal juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah sebagai tempat tinggal juga mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang karena selain sebagai tempat tinggal atau hunian juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan, pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi, karena dengan kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Status sosial seseorang juga dapat ditunjukkan melalui kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu fasilitas perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan adalah kualitas material seperti jenis

atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Selain itu, juga memenuhi fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Secara umum rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki lantai, dinding dan atap yang memenuhi syarat, serta mempunyai luas lantai yang mencukupi/sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum dan tempat pembuangan akhir/tinja. Selain itu kualitas bangunan tempat tinggal dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dari penghuninya. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik tentunya kondisi ekonominya juga lebih baik dibandingkan mereka yang menempati rumah dengan kualitas bangunan yang rendah.

Tabel 6.1. Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2012 - 2016

Indikator Kualitas Perumahan	2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Lantai Bukan Tanah (%)	74,62	78,49	83,71	82,06	81,93
Atap Beton, Genteng, Asbes dan Seng (%)	99,89	100,00	99,91	100,00	100,00
Dinding Terluas Tembok dan Kayu (%)	92,74	94,63	93,09	93,46	94,91

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan, 2016

Berdasarkan data Susenas 2016, persentase rumah tangga di Lamongan yang berlantaikan bukan tanah menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2012. Pada tahun 2016, rumah yang berlantaikan bukan tanah meningkat menjadi sebesar 81,93 persen dibandingkan tahun 2012 sebesar 74,62 persen.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kualitas rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Pada tahun 2012 rumah tempat tinggal dengan atap beton, genteng, sirap dan asbes di Lamongan sebesar 99,89 persen dan pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 100 persen atau dengan kata lain semua rumah tempat tinggal sudah menggunakan atap beton, seng dan asbes.

Pada tahun 2016 kualitas perumahan di Lamongan jika dilihat dari indikator dinding terluas tembok dan kayu telah meningkat menjadi sebesar 94,91 persen dibanding tahun 2012 yang sebesar 92,74 persen. Bila dibandingkan dengan Jawa Timur penggunaan dinding tembok di Lamongan jauh lebih besar dengan perbandingan 85,23 persen dan 94,91 persen.

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal seperti ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari adalah air, sehingga ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan dikonsumsi dan sanitasi merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Tabel 6.2. Persentase rumahtangga menurut Indikator Fasilitas Perumahan, 2012-2016

Indikator Fasilitas Perumahan	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rumah Tangga dengan Sumber air Minum Bersih	94.88	91.73	95.61	95.84	95.39
Rumah Tangga dengan Jamban Milik Sendiri dilengkapi Tangki Septik	87.88	90.49	94.32	93.50	94.94
Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik	99.84	99.91	99.80	100.00	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

Pada tahun 2016, rumah tangga di Lamongan yang menggunakan air minum bersih telah mencapai 95,39 persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai lebih dari 95,84 persen. Kondisi ini sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari semua pihak akan pentingnya air minum bersih bagi kesehatan dan juga ketersediaan air bersih untuk dikonsumsi.

Fasilitas perumahan yang cukup penting peranannya dalam usaha sanitasi adalah penyediaan sarana jamban. Jika dilihat dari segi kesehatan lingkungan dan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia dapat mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2016, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik sudah mencapai 94,94 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 (93,50 persen).

Sumber penerangan merupakan fasilitas perumahan yang penting. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari

listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Rumah tangga di Lamongan yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik tahun 2016 sebanyak 100 persen. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2012 yang hanya mencapai 99,84 persen.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri akan lebih tenang dibandingkan mereka yang menempati rumah sewa apalagi yang bebas sewa karena telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Rumah tangga di Lamongan berdasarkan hasil Susenas 2016 yang menempati rumah milik sendiri sebesar 93,74 persen dan sisanya sebesar 6,26 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari kontrak/sewa sebesar 1,20 persen, bebas sewa sebesar 5,06 persen, rumah dinas dan lainnya masing-masing sebesar 0 persen. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri tahun 2016 mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 yang hanya sebesar 93,40 persen. Kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh terhadap semakin bertambahnya rumahtangga yang memiliki rumah sendiri, seperti salah satunya kebijakan tentang penyediaan rumah sederhana untuk

Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2012-2016

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Milik Sendiri	89.91	91.90	92.50	93.40	93.74
Kontrak/Sewa	0.95	1.21	1.04	0.81	1.20
Bebas Sewa	2.07	6.30	6.37	5.16	5.06
Dinas	6.86	0.59	0.09	0.39	-
Lainnya	0.22	-	-	0.24	-

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

masyarakat menengah ke bawah ataupun juga dari sisi pendanaan seperti pengurangan suku bunga pinjaman, pemberian kredit ringan dan sebagainya.



7. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mahatma Gandhi menyebut mereka sebagai *the last, the least, the lowest, and the loss*. Pada dasarnya kemiskinan berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap negara. Di Indonesia, tiap era kepemimpinan memiliki program khusus untuk pengentasan kemiskinan. Pada masa orde baru pernah digalakkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur di desa-desa yang relatif belum maju. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, masa kepemimpinan Jokowi-JK juga menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pemerintah sebagaimana tertuang dalam sembilan agenda prioritas, nawa cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan,

Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Lamongan, 2012-2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Penduduk Miskin	197.90	192.00	186.10	183.60	176.92
2	Persentase Penduduk Miskin (P0)	16.70	16.18	15.68	15.38	14.89
3	Garis Kemiskinan (GK)	260,787	279,166	289,403	303.78	321,002
4	Kedalamam Kemiskinan (P1)	1.92	2.00	2.40	2.25	2.40
5	Keparahan Kemiskinan (P2)	0.36	0.40	0.55	0.58	0.66

Sumber Data : BPS Kabupaten Lamongan

peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Lamongan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif (TNP2K, 2014). Selama tahun 2012-2016, persentase penduduk miskin cenderung menurun seiring banyaknya program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah. Pada Tahun 2012 penduduk miskin sebesar 16,70 persen, kemudian turun menjadi 16,18 persen pada Tahun 2013. Penurunan ini terus berlanjut Tahun 2014, sehingga penduduk miskin mencapai 15,68 persen, dan Tahun 2015 juga mengalami penurunan menjadi 15,38 persen. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin juga terus mengalami penurunan hingga mencapai 14,89 persen.

Secara umum, dalam periode 2003-2016 tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2006 (untuk jumlah dan persentase) dan 2007 (untuk persentase). Untuk tahun 2006, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin

mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2005, yang disebabkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah pada 1 Oktober 2005. Perlu waktu setidaknya dua tahun, bagi sebagian rumah tangga miskin di Kabupaten Lamongan untuk keluar dari bawah garis kemiskinan. Karena meskipun dari sisi jumlah penduduk miskin tahun 2007 turun 6,6 ribu jiwa dibandingkan tahun 2006, namun secara persentase kondisi tahun 2007 masih meningkat sebesar 0,05 poin persen dibandingkan 2006.

Bila memperhatikan historis kemiskinan Kabupaten Lamongan selama 2003-2016, maka cukup berat peluang menurunkan angka kemiskinan per tahun lebih dari satu persen, yang terakhir terjadi pada tahun 2010-2011, terutama ketika kemiskinan di Kabupaten Lamongan masih berada di kisaran 17 persen. Gangguan gejala perubahan harga akibat kebijakan eksternal, turut memberi koreksi pada penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu, dimana tingkat kemiskinan di Jawa Timur dan sebagian besar kabupaten-kota mengalami peningkatan, tidak

Tabel 7.2 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Lamongan, 2003-2016



demikian untuk Kabupaten Lamongan tahun 2015 yang tetap turun meskipun penurunannya hanya sebesar 0,30 persen dibandingkan tahun 2014.

7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan terpisah antara daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Lamongan mengalami peningkatan antar waktu selama 2003-2016. Pada Tahun 2003 garis kemiskinan Lamongan sebesar Rp. 149.680 dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 321.002 pada Tahun 2016.

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P_1 , dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P_2).

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) mecapai 3,91 pada tahun 2003 kemudian menurun 0,63 poin menjadi 3,28 pada tahun 2004, P_1 kemudian meningkat pada periode 2005, tetapi pada tahun 2006 kembali menurun. Selama 2006 sampai 2008 terjadi kenaikan P_1 sebesar 0,52 poin, dari 4,16 pada 2006 menjadi 4,68 pada tahun 2008. Kenaikan P_1 ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Dengan kata lain

Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Perubahan Penduduk Miskin dan Kenaikan Garis Kemiskinan, 2003-2016

Tahun	Garis Kemiskinan/ GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Perubahan Persentase Penduduk Miskin (%)	Perubahan Kenaikan Garis Kemiskinan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2003	149.680	343,6	-	27,81	-	-
2004	145.808	318,4	-25,20	25,74	-2,07	-2,59
2005	162.281	280,8	-37,60	23,13	-2,61	11,30
2006	172.062	304,2	23,40	25,74	2,61	6,03
2007	176.738	297,6	-6,60	25,79	0,05	2,72
2008	177.003	259,7	-37,90	22,51	-3,28	0,15
2009	201.771	235,9	-23,80	20,47	-2,04	13,99
2010	221.413	220,6	-15,30	18,70	-1,77	9,73
2011	242.441	206,7	-13,90	17,41	-1,29	9,50
2012	260.787	197,9	-8,80	16,70	-0,71	7,57
2013	279.166	192,0	-5,90	16,18	-0,52	7,05
2014	289.403	186,1	-5,90	15,68	-0,50	3,67
2015	303.780	182,64	-3,46	15,38	-0,30	4,97
2016	321.002	176,92	-5,72	14,89	-0,49	5,67

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan, Susenas 2003-2016

penduduk Lamongan mengalami kemiskinan yang semakin dalam. Akan tetapi tahun 2009 hingga 2016 menurun menjadi 2,40.

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) Lamongan memiliki pola yang serupa dengan indeks kedalaman kemiskinan (P_1) antar waktu. Tahun 2003 P_2 Lamongan sebesar 0,88 dan sedikit menurun 015 poin pada tahun 2004. Pada tahun 2005 P_2 meningkat menjadi 1,20 sampai 1,38 di tahun 2008. Kemudian pada tahun 2009 P_2 kembali menurun menjadi 0,71. Nilai P_2 yang cenderung meningkat ini menandakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin lebar.

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi pendidikan dan ketenagakerjaan dari anggota rumah tangga, serta kondisi perumahan rumah tangga. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar penyusunan ke-

Tabel 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Lamongan, 2003-2016

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
(1)	(2)	(3)
2003	3,91	0,88
2004	3,28	0,73
2005	4,45	1,20
2006	4,16	1,04
2007	4,17	1,02
2008	4,68	1,38
2009	2,94	0,71
2010	2,81	0,64
2011	2,07	0,45
2012	1,92	0,36
2013	2,00	0,40
2014	1,78	0,36
2015	2,25	0,58
2016	2,40	0,66

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan, Susenas 2003-2016

bijakan dan program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

7.3 Karakteristik Pendidikan Anggota Rumah Tangga

Pembahasan mengenai kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Kemiskinan lekat dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga jika kesempatan menikmati pendidikan dimiliki oleh anggota rumah tangga miskin, maka kemungkinan untuk keluar dari kemiskinan dimasa yang akan datang akan semakin besar.

Karakteristik pendidikan penduduk miskin di Lamongan semakin membaik setiap tahun seiring gencarnya program pendidikan

Tabel 7.4 Karakteristik Pendidikan Penduduk Miskin Lamongan, 2014-2016

Karakteristik Pendidikan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Angka Melek Huruf			
a. 15 - 24 Tahun	100.00	100.00	100.00
b. 15 - 55 Tahun	94.95	98.60	96.78
2. Angka Partisipasi Sekolah			
a. 7 - 12 Tahun	100.00	96.94	100.00
b. 13 - 15 Tahun	100.00	95.00	100.00
3. Pendidikan yang Ditamatkan (15 +)			
a. Tidak Tamat SD	28.70	35.02	31.62
b. Tamat SD dan SLTP	47.87	45.73	51.54
c. Tamat SLTA ke atas	23.43	19.25	16.83

Sumber: BPS Republik Indonesia

yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, khususnya penduduk miskin. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana. Peningkatan AMH penduduk miskin di Lamongan selama tiga tahun terakhir tampak baik pada kelompok umur 15-24 tahun maupun kelompok umur 15-55 tahun. Pada tahun 2014, 2015, dan 2016, AMH untuk kelompok umur 15-24 tahun sebesar 100,00 persen. Sementara itu, pada kelompok umur 15-55 tahun terjadi kenaikan sebesar 1,83 poin persen selama tahun 2014-2016.

Kenaikan angka melek huruf pada penduduk miskin selama tiga tahun terakhir sejalan dengan kenaikan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Pada tahun 2014, APS penduduk miskin usia 7-12 tahun di Lamongan sebesar 100,00 persen, kemudian tahun 2015

menurun menjadi 96,94 dan kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 100,00 persen. Sementara itu, APS penduduk miskin usia 13-15 tahun memiliki fluktuasi yang sama dengan APS 7-12. Pada tahun 2014 angkanya mencapai 100,00 persen, kemudian menurun menjadi 95,00 persen pada 2015, kemudian meningkat lagi menjadi 100,00. APS penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun ini dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di antara penduduk miskin berusia sekolah.

Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, pada tahun 2014 terdapat sekitar 47,87 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Lamongan yang tamat SD dan SLTP, kemudian menurun menjadi 45,73 persen pada tahun 2014 dan meningkat lagi di tahun 2016 menjadi 51,54 persen. Sedangkan untuk penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tamat SLTA ke atas pada tahun 2014 mencapai 23,43 persen dan terus menurun menjadi 16,83 persen pada tahun 2016. Sementara itu, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD berfluktuatif persentasenya dari tahun ke tahun, yaitu 28,70 persen pada 2014; 35,02 persen pada 2015; dan 31,62 persen pada 2016.

7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan Anggota Rumah Tangga

Beberapa ahli menyatakan bahwa pengangguran merupakan awal dari kemiskinan, meskipun untuk membuktikannya secara empiris tidaklah mudah. Pengangguran menyebabkan seseorang tidak memiliki pendapatan sehingga kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pada akhirnya menjauhkannya dari akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak.

Persentase penduduk miskin Lamongan usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tidak banyak mengalami perubahan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja sebesar 33,66 persen, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 33,49 persen, dan meningkat 6,66 poin persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 40,15 persen.

Penduduk miskin identik dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga berpengaruh pada pemilihan jenis pekerjaan. Sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor informal, dengan kecenderungan yang terus menurun selama 2014-2016. Pada tahun 2014 terdapat sebanyak 50,09 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Lamongan yang bekerja di sektor informal. Kemudian meningkat menjadi 50,17 persen pada tahun 2015, dan kembali menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 43,49 persen. Penurunan persentase penduduk miskin

Tabel 7.4 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas di Lamongan Menurut Status Bekerja dan Lapangan Pekerjaan, 2014-2016

Karakteristik Ketenagakerjaan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Status Bekerja			
Tidak Bekerja	33.66	33.49	40.15
Bekerja di Sektor Informal	50.09	50.17	43.49
Bekerja di Sektor Formal	16.25	16.34	16.36
2. Lapangan Pekerjaan			
Tidak Bekerja	33.66	33.49	40.15
Bekerja di Sektor Pertanian	40.06	39.38	34.06
Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	26.28	27.13	25.80

Sumber: BPS Republik Indonesia

yang bekerja di sektor informal ini diikuti dengan semakin banyaknya penduduk miskin yang bekerja di sektor formal. Selama tahun 2014-2016 masing-masing sebesar 16,25 persen; 16,34 persen; dan 16,36 persen.

Jika dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian cenderung lebih besar dibanding penduduk miskin yang bekerja bukan di sektor pertanian. Pada tahun 2014 sebanyak 40,06 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian, dan jumlahnya relatif menurun pada tahun-tahun berikutnya sehingga menjadi 34,06 persen pada tahun 2016. Sementara itu, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja bukan di sektor pertanian pada tahun 2014 sebesar 26,28 persen, kemudian meningkat menjadi 27,13 persen pada tahun 2015 dan menurun menjadi 25,80 persen pada tahun 2016.

7.5. Karakteristik Perumahan Rumah Tangga

Karakteristik perumahan merupakan karakteristik rumah tangga miskin yang tidak kalah penting untuk dibahas. BPS menggunakan delapan variabel utama untuk mendefinisikan rumah tangga miskin, yaitu luas lantai perkapita, jenis lantai, ketersediaan air bersih, jenis jamban, kepemilikan asset, pendapatan pengeluaran, dan konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam). Adanya keterbatasan untuk melakukan kegiatan di dalam rumah yang sempit menandakan kualitas hidup yang lebih rendah dibanding mereka yang lebih leluasa beraktivitas di dalam rumah (TNP2K, 2010). Rumah tangga miskin cenderung memiliki luas lantai perkapita lebih kecil. Namun di Lamongan lebih dari separuh rumah tangga miskin memiliki luas lantai perkapita di atas 15 m². Hal ini disebabkan oleh

karakteristik perumahan yang memiliki luas lantai perkapita relatif besar, serta sebagian besar penduduk miskin berada di perdesaan.

Pada tahun 2014 terdapat 10,58 persen rumah tangga miskin yang memiliki luas lantai perkapita kurang dari 8 m²; 39,44 persen rumah tangga miskin dengan luas lantai perkapita antara 8-15 m²; serta 49,99 persen rumah tangga miskin yang luas lantai perkapitanya di atas 15 m². Sementara itu, pada tahun 2016 kompo-

Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Karakteristik Perumahan, 2014-2016

Karakteristik Perumahan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Luas Lantai Perkapita Rumah Tangga Miskin			
< 8 m ²	10.58	9.16	11.18
8 - 15 m ²	39.44	35.71	30.29
> 15 m ²	49.99	55.13	58.53
2. Penggunaan Air Bersih			
Rumah Tangga Miskin	70.40	83.85	81,82
Rumah Tangga Tidak Miskin	85.83	87.55	91,60
3. Penggunaan Jamban Sendiri/Bersama			
Rumah Tangga Miskin	71.20	61.52	77.15
Rumah Tangga Tidak Miskin	92.67	80.45	91,64

Sumber: BPS Republik Indonesia

sisinya berubah menjadi 11,18 persen; 30,29 persen; dan 58,53 persen.

Penggunaan air bersih berkaitan dengan kualitas hidup seseorang. Air bersih sangat dibutuhkan untuk kebutuhan minum dan sanitasi. Air minum yang tidak terjamin kebersihannya berbahaya bagi kesehatan karena dapat menimbulkan penyakit. Ketika

kepala rumah tangga atau ada anggota rumah tangga yang sakit, pengeluaran untuk berobat akan semakin menambah beban rumah tangga tersebut yang pada akhirnya semakin mendorong ke tingkat kemiskinan yang semakin dalam (TNP2K, 2010). Air bersih yang dicakup di sini adalah air kemasan bermerk, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, dan sumur/mata air terlindung.

Secara relatif, penggunaan air bersih pada rumah tangga tidak miskin lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga miskin; dengan kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya baik untuk rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin. Pada tahun 2014 rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih sebesar 70,40 persen, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 81,82 persen. Sedangkan untuk rumah tangga tidak miskin pada Tahun 2014 yang menggunakan air bersih sebesar 85,83 persen, naik menjadi 91,60 persen pada Tahun 2016.

Karakteristik perumahan yang tidak kalah penting untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin adalah penggunaan jamban sendiri/bersama. Ketersediaan tempat buang air besar (jamban) di rumah tangga merupakan salah satu syarat hidup sehat. Sebagaimana penggunaan air bersih, penggunaan jamban sendiri/bersama pada rumah tangga miskin di Jawa Timur relatif lebih kecil dibandingkan rumah tangga tidak miskin.

Pada tahun 2014 terdapat 71,20 persen rumah tangga miskin di Lamongan yang menggunakan jamban sendiri/bersama. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri menjadi 77,15 persen. Sedangkan untuk rumah tangga tidak miskin justru mengalami penurunan yaitu dari 92,67 persen pada tahun 2014 menjadi 91,64 persen pada Tahun 2016.



8. SOSIAL LAINNYA

8.1. Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan

Melakukan perjalanan adalah bagian kebutuhan dasar manusia. Perjalanan dilakukan selain untuk aktivitas pekerjaan, juga untuk mencukupi kebutuhan rohani. Penduduk Kabupaten Lamongan selama enam bulan terakhir yang melakukan perjalanan sebesar 14,89 persen. Penduduk Perempuan lebih banyak yang melakukan perjalanan wisata dibandingkan dengan penduduk Laki-Laki, yaitu sebesar 16,10 persen sedangkan penduduk Laki-Laki sebesar 13,61 persen.

Gambar 8.1 Persentase Penduduk Lamongan yang Melakukan Perjalanan 2016

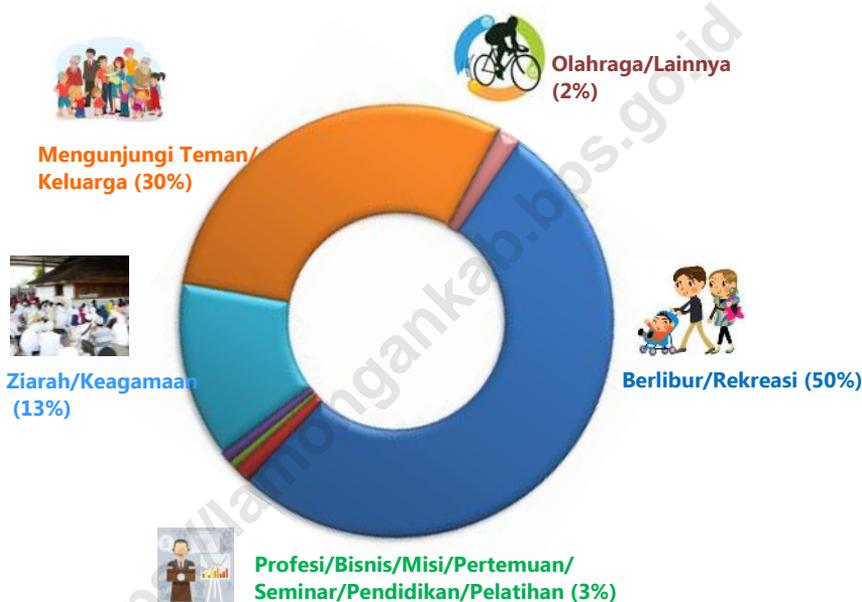


Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

Berbagai tujuan yang dilakukan penduduk Lamongan untuk melakukan perjalanan. Tujuan perjalanan yang dilakukan oleh penduduk sebagian besar digunakan untuk berlibur/rekreasi (50 persen) dan mengunjungi teman/keluarga (30 persen).

Perjalanan terbanyak penduduk dimanfaatkan untuk berlibur/rekreasi. Untuk menghilangkan kepenatan dalam mengerjakan rutinas sehari-hari, banyak orang memilih rekreasi. Selain tempat wisata yang ada di Kabupaten Lamongan, juga didukung oleh Jawa Timur memiliki banyak tempat hiburan untuk rekreasi seperti wisata alam pantai, gunung, danau, hutan lindung, hutan konservasi, taman hiburan, dan tempat bermain. Sarana dan prasarana transportasi yang semakin baik sangat mendukung

Gambar 8.2 Persentase Tujuan Utama Penduduk Lamongan Melakukan Perjalanan 2016



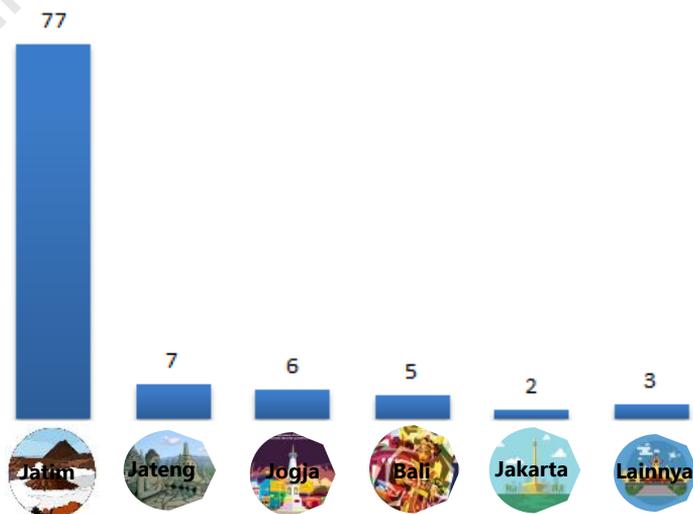
Sumber : BPS Kabupaten Lamongan

Penduduk Lamongan mayoritas muslim mempunyai budaya pulang kampung pada hari raya Idul Fitri. *Peak season* penduduk yang melakukan perjalanan terjadi antara H-7 hingga H+7 hari raya. Perekonomian berjalan cukup cepat pada momen musiman itu di seluruh sektor ekonomi. Fenomena tersebut dapat menjelaskan penduduk Lamongan yang melakukan perjalanan terbanyak kedua dengan tujuan mengunjungi keluarga/teman.

Berdasarkan data Susenas 2016, penduduk Lamongan yang melakukan perjalanan dalam rangka tujuan keagamaan atau ziarah pada tercatat sebanyak 13 persen, merupakan tujuan perjalanan ketiga terbanyak. Sedangkan tujuan utama lainnya seperti bepergian untuk profesi/bisnis, Misi/Pertemuan/Seminar/pendidikan dan pelatihan 3 persen, terendah tercatat pada tujuan utama untuk olahraga/lainnya sebesar 2 persen.

Berdasar daerah tujuan utama penduduk Lamongan melakukan perjalanan pada Tahun 2016 ini, paling banyak dengan Tujuan Jawa Timur yaitu sebesar 77 persen. Ini berarti bahwa sebagian besar tujuan perjalanan penduduk berlibur/rekreasi dengan tujuan tempat wisata di Jawa Timur. Memang Jawa Timur banyak terdapat destinasi wisata baru utamanya di Kota Surabaya, Kota Batu dan Kabupaten Banyuwangi. Daerah tujuan utama yang lainnya dengan persentase yang sama yaitu Jawa Tengah sebanyak 7 persen, Jogja sebanyak 6 persen dan Bali sebanyak 5 persen.

Gambar 8.3 Daerah Tujuan Utama Penduduk Lamongan Melakukan Perjalanan 2016



Sumber : BPS Kabupaten Lamongan

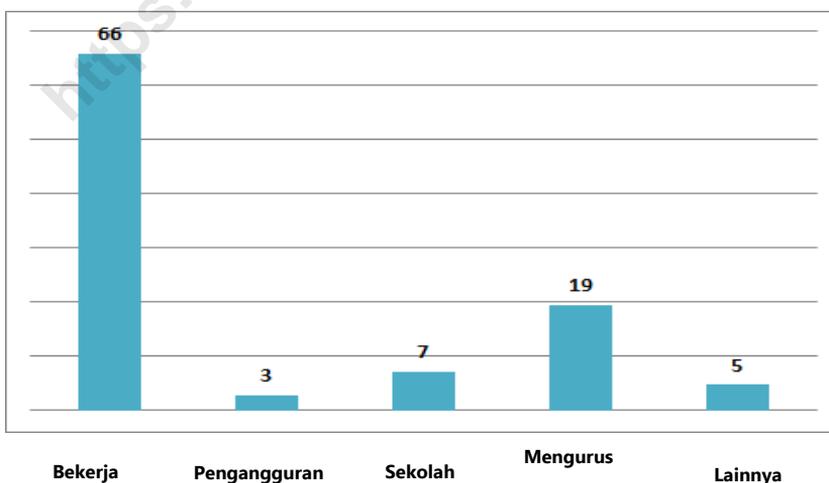
8.2. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Menurut kegiatannya, penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi menjadi lima kelompok besar yaitu penduduk yang bekerja, pengangguran, sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya.

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang kegiatan seminggu terakhir bekerja tercatat sebanyak 66 persen. Bekerja yang dimaksud disini adalah melakukan kegiatan bekerja minimal satu jam yang menghasilkan nilai ekonomis dalam seminggu terakhir baik sebagai pengusaha, pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga).

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan bekerja tercatat terbanyak dibanding kegiatan lainnya. Terbanyak kedua adalah penduduk yang mengurus rumah tangga atau sebesar 19 persen. Distribusi penduduk ketiga yang terbesar adalah sekolah sebanyak 7 persen. Urutan selanjutnya adalah penduduk yang melakukan kegiatan lainnya, seperti penduduk yang tidak melakukan kegiatan apapun, punya pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang melakukan kegiatan lainnya sebanyak 5 persen.

Gambar 8.4 Persentase Penduduk Lamongan Menurut Kegiatan 2016



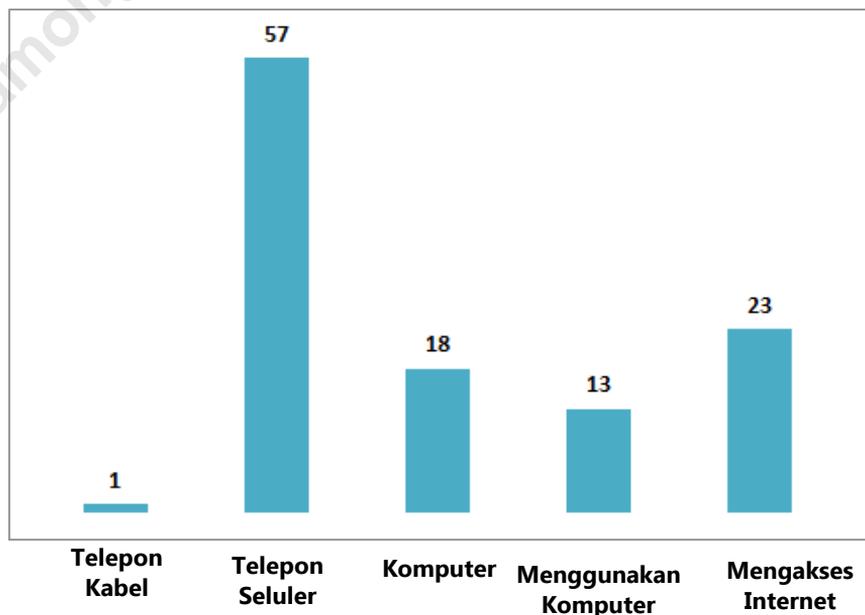
Sumber : BPS Kabupaten Lamongan

8.3. Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hal yang tak kalah menarik untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan kesejahteraan rakyat dengan melihat penguasaan/ kepemilikan akses teknologi informasi dan komunikasi. Di abad ke 20 ini, kemajuan teknologi informasi berkembang cepat. Era penggunaan telepon sudah bergeser ke *hand phone* (HP). Bagi masyarakat sekarang, HP lebih praktis dan ekonomis dibanding telepon. Memiliki HP tidak memerlukan biaya pemasangan dan tidak tergantung adanya sarana kabel telepon. Cukup dengan tower signal, penggunaan HP bisa dilakukan dimana saja.

Di samping itu, pembelian pulsa HP bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing individu. Bahkan hanya dengan perangkat HP, siapapun bisa melakukan akses internet dengan tujuan yang lebih luas.

Gambar 8.5 Persentase Rumah Tangga yang Menguasai/Memiliki Alat Komunikasi dan Informasi di Lamongan 2016



Sumber : BPS Kabupaten Lamongan

Kepopuleran HP dibandingkan telepon bisa ditunjukkan dari hasil data Susenas terakhir. Rumah tangga yang mempunyai telepon di rumah pada tahun 2016 tercatat 1 persen. Kondisi ini berbeda jauh dengan rumah tangga yang anggotanya mempunyai HP yang mencapai lebih dari 57 persen. Rumah tangga yang menggunakan HP merasa cukup terbantu dibanding yang menggunakan telepon. Berbagai aplikasi yang ditawarkan oleh Perusahaan Komunikasi selular, menjadikan HP sebagai alat komunikasi yang paling diminati di kalangan masyarakat.

Dengan memanfaatkan aplikasi HP, rumah tangga bisa melakukan komunikasi lewat BBM, facebook, whatsapp, Line dan lain sebagainya yang tidak kesemuanya tidak bisa dinikmati pengguna telepon biasa. Kelebihan lainnya, untuk daerah-daerah terpencil yang tidak mempunyai jaringan telepon, rumah tangga bisa melakukan komunikasi melalui HP berkat adanya tower signal di daerah tersebut.

Sementara, dari seluruh rumah tangga, anggota rumah tangganya yang menguasai atau memiliki alat informasi berupa komputer atau laptop tercatat sebesar 18 persen. Persentase ini diduga semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring semakin meningkatnya kebutuhan pendidikan dan informasi.

Beberapa rumah tangga memanfaatkan komputer dan laptop sebagai sarana penunjang pendidikan dan mengembangkan bisnis (hasil usaha). Berbagai produk usaha dapat dipasarkan dengan menggunakan komputer dan laptop yang terhubung jaringan internet memunculkan pasar online. Pendek kata, penggunaan alat komunikasi dan informasi semakin diperlukan dan berkembang di tengah masyarakat.

8.4. Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha dan Penerima Pelayanan Kesehatan Gratis

Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, banyak tersedia kredit usaha dari Pemerintah dan Swasta. Bahkan untuk

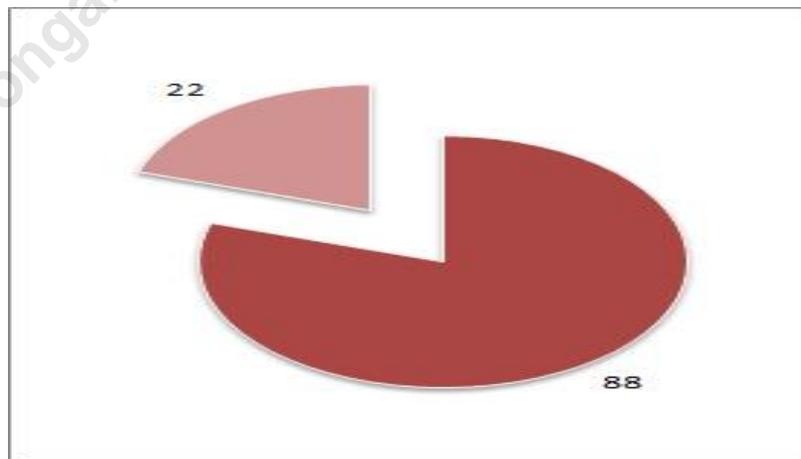
mendukung usaha mikro kecil dan menengah, Pemerintah mengeluarkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan prosedur yang mudah dan bunga yang relatif murah.

Terkait kredit usaha rakyat, tidak sedikit masyarakat yang masih minim pengetahuannya tentang kredit usaha. Akibatnya, di antaranya terjebak pada rentenir dan sistem ijon. Sosialisasi KUR juga dirasakan minim. Hal ini menyebabkan rumah tangga yang memanfaatkan kredit usaha tidak begitu banyak.

Rumah tangga di Lamongan yang menerima kredit usaha pada tahun 2016 hanya tercatat 22 persen. Dari total penerima kredit usaha, terbanyak menggunakan program kredit usaha rakyat (KUR) atau sebesar 38,36 persen, diikuti program koperasi (26,13 persen) dan program PNPM (10,26 persen).

Di beberapa daerah khususnya perdesaan, usaha koperasi lebih

Gambar 8.6 Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha di



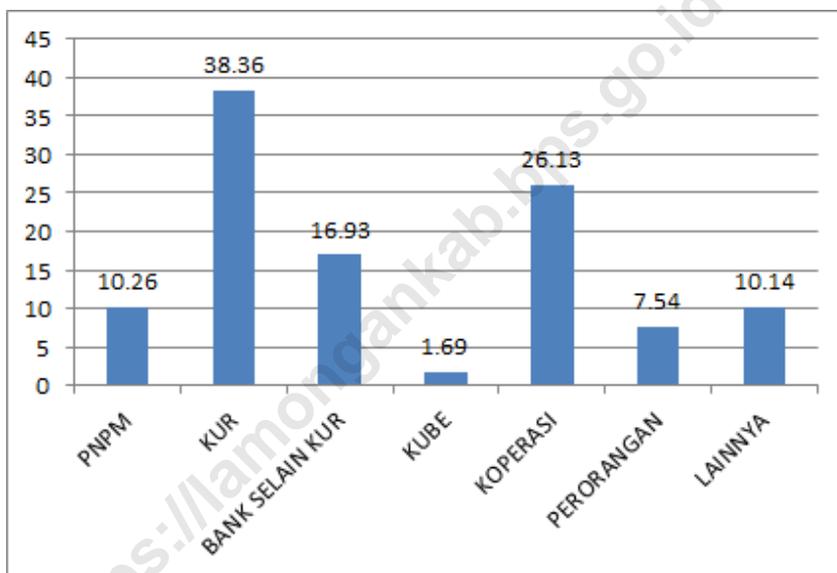
Sumber : BPS Kabupaten Lamongan

menonjol dibanding perusahaan pembiayaan lainnya. Meskipun pada umumnya perusahaan pembiayaan di daerah sebagian besar adalah bank, koperasi tetap menjadi pilihan favorit masyarakat perdesaan. Bagi

masyarakat perdesaan, prosedur pengajuan kredit melalui bank dianggap cukup rumit sehingga ada rasa takut untuk memanfaatkan kredit usaha.

Kondisi itu berbeda dengan prosedur pengambilan kredit melalui koperasi yang dianggap lebih ringkas dan jangkauannya hingga ke pelosok daerah. Selain bisa memanfaatkan sebagai tempat pemberian kredit, melalui koperasi juga bisa dimanfaatkan sebagai media pemasaran hasil produksi usaha.

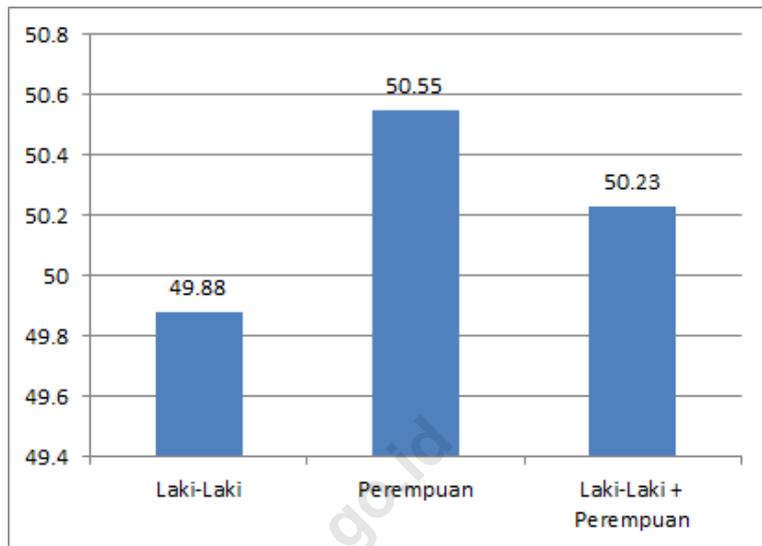
Gambar 8.7 Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Lamongan 2016



Sumber : BPS Kabupaten Lamongan

Selain adanya program kredit usaha, program kesejahteraan rakyat di Lamongan juga melalui pemberian pelayanan kesehatan gratis. Dari seluruh penduduk yang memiliki Jaminan kesehatan tercatat sebanyak 50,23 persen. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk yang memiliki jaminan kesehatan terdiri 49,88 persen penduduk laki-laki dan 50,55 persen penduduk perempuan.

Gambar 8.8 Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Lamongan 2016



Sumber : BPS Kabupaten Lamongan

Jaminan pelayanan kesehatan sangat dirasakan oleh masyarakat, mengingat biaya berobat di rumah sakit umum dan swasta termasuk membeli obat masih relatif mahal. Dari target seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan tentunya masih harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini.

8.5. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan

Kenyamanan individu dari kejahatan merupakan salah satu bagian dari kesejahteraan rakyat. Semakin sejahtera suatu wilayah, semakin aman masyarakatnya dari tindak kejahatan. Pada tahun 2016 tercatat penduduk yang mengalami tindak kejahatan kurang dari 1 persen. Kejahatan yang dimaksud meliputi pencurian, penganiayaan, perampokan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya.

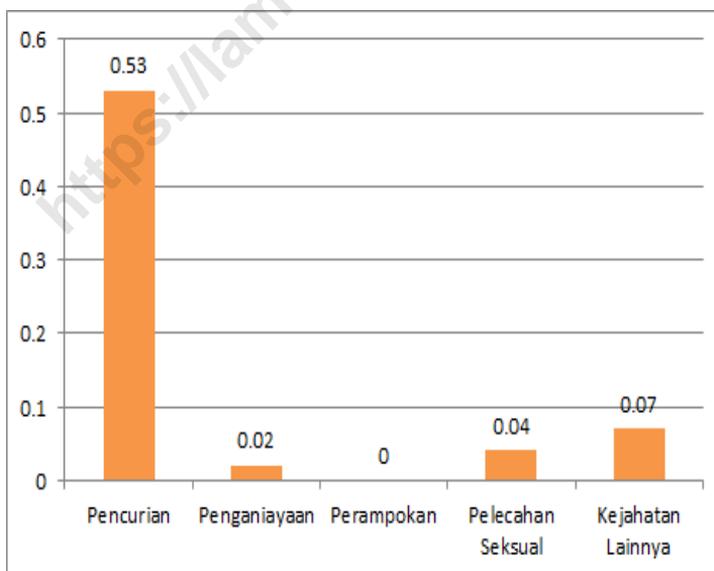
Gambar 8.9 Persentase Penduduk Lamongan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan 2016



Sumber: BPS Kabupaten Lamongan

Korban kejahatan terbanyak tercatat pada kejahatan pencurian sebesar 0,53 persen terutama pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Kejahatan Lainnya, seperti penipuan, gendam menempati urutan kedua sebesar 0,07 persen, diikuti kejahatan pelecahan seksual sebesar 0,04 persen.

Gambar 8.10. Persentase Penduduk Lamongan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan 2016



Sumber : BPS Kabupaten Lamongan

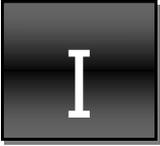
LAMPIRAN

<https://lamongankab.bps.go.id>

Perkembangan Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sukorame	20,260	20,308	20,336	20,363	20,384
2.	Bluluk	21,684	21,789	21,872	21,956	22,031
3.	Ngimbang	44,349	44,638	44,884	45,131	45,363
4.	Sambeng	48,122	48,143	48,116	48,086	48,041
5.	Mantup	43,213	43,404	43,550	43,695	43,826
6.	Kembangbahu	46,487	46,671	46,807	46,942	47,061
7.	Sugio	54,499	54,466	54,377	54,286	54,179
8.	Kedungpring	49,914	49,681	49,401	49,120	48,825
9.	Modo	45,054	45,049	44,999	44,946	44,880
10.	Babat	76,064	75,947	75,756	75,561	75,342
11.	Pucuk	38,348	37,983	37,585	37,189	36,785
12.	Sukodadi	51,082	51,234	51,334	51,433	51,514
13.	Lamongan	66,559	67,225	67,829	68,435	69,026
14.	Tikung	42,377	42,779	43,142	43,505	43,858
15.	Sarirejo	22,656	22,712	22,746	22,778	22,803
16.	Deket	41,626	41,875	42,082	42,290	42,484
17.	Glagah	35,009	34,979	34,913	34,846	34,768
18.	Karangbinangun	33,203	33,137	33,037	32,938	32,826
19.	Turi	47,876	47,918	47,910	47,901	47,877
20.	Kalitengah	30,010	29,944	29,850	29,754	29,650
21.	Karanggeneng	35,928	35,576	35,193	34,811	34,424
22.	Sekaran	32,505	32,036	31,544	31,057	30,569
23.	Maduran	25,269	24,772	24,261	23,760	23,261
24.	Laren	35,360	34,796	34,211	33,634	33,054
25.	Solokuro	40,228	40,532	40,799	41,065	41,320
26.	Paciran	93,130	94,241	95,281	96,318	97,333
27.	Brondong	63,769	64,547	65,269	65,995	66,709
Jumlah		1,184,581	1,186,382	1,187,084	1,187,795	1,188,193

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan



Laju Pertumbuhan Penduduk

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sukorame	0.24	0.14	0.13	0.10
2.	Bluluk	0.48	0.38	0.38	0.34
3.	Ngimbang	0.65	0.55	0.55	0.51
4.	Sambeng	0.04	-0.06	-0.06	-0.09
5.	Mantup	0.44	0.34	0.33	0.30
6.	Kembangbahu	0.40	0.29	0.29	0.25
7.	Sugio	-0.06	-0.16	-0.17	-0.20
8.	Kedungpring	-0.47	-0.56	-0.57	-0.60
9.	Modo	-0.01	-0.11	-0.12	-0.15
10.	Babat	-0.15	-0.25	-0.26	-0.29
11.	Pucuk	-0.95	-1.05	-1.05	-1.09
12.	Sukodadi	0.30	0.20	0.19	0.16
13.	Lamongan	1.00	0.90	0.89	0.86
14.	Tikung	0.95	0.85	0.84	0.81
15.	Sarirejo	0.25	0.15	0.14	0.11
16.	Deket	0.60	0.49	0.49	0.46
17.	Glagah	-0.09	-0.19	-0.19	-0.22
18.	Karangbinangun	-0.20	-0.30	-0.30	-0.34
19.	Turi	0.09	-0.02	-0.02	-0.05
20.	Kalitengah	-0.22	-0.31	-0.32	-0.35
21.	Karanggeneng	-0.98	-1.08	-1.09	-1.11
22.	Sekaran	-1.44	-1.54	-1.54	-1.57
23.	Maduran	-1.97	-2.06	-2.07	-2.10
24.	Laren	-1.60	-1.68	-1.69	-1.72
25.	Solokuro	0.76	0.66	0.65	0.62
26.	Paciran	1.19	1.10	1.09	1.05
27.	Brondong	1.22	1.12	1.11	1.08
Jumlah		0.15	0.06	0.06	0.03

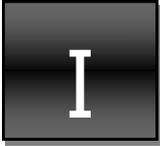
Sumber : BPS Kabupaten Lamongan



Rasio Jenis Kelamin Penduduk

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sukorame	96.87	97.01	96.94	96.95	96.97
2.	Bluluk	92.70	92.81	92.74	92.75	92.76
3.	Ngimbang	97.69	97.81	97.74	97.75	97.77
4.	Sambeng	97.11	97.23	97.17	97.18	97.20
5.	Mantup	96.92	97.05	96.99	96.98	97.01
6.	Kembangbahu	98.83	98.97	98.90	98.91	98.93
7.	Sugio	95.45	95.58	95.51	95.52	95.54
8.	Kedungpring	91.99	92.12	92.05	92.06	92.07
9.	Modo	93.40	93.52	93.46	93.47	93.48
10.	Babat	96.67	96.80	96.73	96.74	96.76
11.	Pucuk	92.96	93.08	93.02	93.02	93.05
12.	Sukodadi	93.74	93.87	93.81	93.81	93.83
13.	Lamongan	95.68	95.81	95.74	95.75	95.77
14.	Tikung	97.56	97.69	97.63	97.63	97.65
15.	Sarirejo	97.15	97.26	97.21	97.21	97.22
16.	Deket	99.21	99.34	99.27	99.27	99.30
17.	Glagah	96.67	96.80	96.73	96.74	96.75
18.	Karangbinangun	94.12	94.25	94.19	94.20	94.23
19.	Turi	97.00	97.13	97.06	97.07	97.09
20.	Kalitengah	91.99	92.11	92.05	92.06	92.08
21.	Karanggeneng	89.60	89.72	89.66	89.66	89.68
22.	Sekaran	88.11	88.23	88.17	88.17	88.19
23.	Maduran	86.83	86.94	86.90	86.90	86.91
24.	Laren	84.44	84.55	84.49	84.50	84.51
25.	Solokuro	86.72	86.84	86.78	86.79	86.80
26.	Paciran	93.92	94.05	93.98	94.00	94.01
27.	Brondong	95.04	95.17	95.11	95.11	95.13
Jumlah		94.29	94.43	94.38	94.41	94.44

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan



Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)

No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sukorame	489	490	490	491	492
2.	Bluluk	400	402	404	405	407
3.	Ngimbang	388	390	393	395	397
4.	Sambeng	246	246	246	246	246
5.	Mantup	464	466	468	469	471
6.	Kembangbahu	728	731	733	735	737
7.	Sugio	597	597	596	595	593
8.	Kedungpring	591	588	585	582	578
9.	Modo	579	579	578	578	577
10.	Babat	1,208	1,206	1,203	1,200	1,197
11.	Pucuk	855	847	838	829	820
12.	Sukodadi	976	979	981	983	985
13.	Lamongan	1,648	1,665	1,680	1,695	1,709
14.	Tikung	800	807	814	821	828
15.	Sarirejo	478	479	480	481	481
16.	Deket	832	837	841	845	849
17.	Glagah	864	863	862	860	858
18.	Karangbinangun	628	627	625	623	621
19.	Turi	816	816	816	816	816
20.	Kalitengah	692	691	689	686	684
21.	Karanggeneng	700	693	686	678	671
22.	Sekaran	655	645	635	626	616
23.	Maduran	838	822	805	788	772
24.	Laren	368	362	356	350	344
25.	Solokuro	398	401	404	407	409
26.	Paciran	1,945	1,968	1,990	2,011	2,032
27.	Brondong	855	865	875	885	894
Jumlah		653	654	655	655	655

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan



Indikator Kesehatan dan Gizi

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (IMR)	30.33	30.22	30.16	30.11	30.13
2.	Angka Harapan Hidup (AHH)	71.35	71.43	71.47	71.67	71.73
3.	Persentase Anak Baduta Yang Pernah Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI)	93.19	93.67	95.30	95.97	98.81
4.	Rata-Rata Lamanya Pemberian ASI pada Anak Baduta (Bulan)	9.38	9.87	9.82	10.07	10.38
5.	Persentase Anak Usia 12-59 bulan yang Mendapatkan Imunisasi					
	BCG	99.15	99.81	98.57	99.41	96.89
	DPT	83.96	90.78	93.61	86.58	95.85
	Polio	85.41	89.35	62.49	90.99	95.33
	Campak	98.33	98.73	98.59	90.77	92.74
	Hepatitis B	82.76	83.65	88.35	84.34	94.30
6	Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan					
	Dokter	16.08	25.70	29.28	44.33	49.94
	Bidan	82.15	71.92	70.72	52.04	49.11
	Tenaga Kesehatan Lain	0.00	0.00	0.00	3.63	0.94
	Dukun Tradisional	1.77	2.38	0.00	0.00	0.00
	Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat					
	Rumah Sakit	9.18	4.47	4.79	13.01	10.86
	Klinik/Praktek Dokter	15.42	20.31	15.11	10.38	6.82
	Puskesmas	12.22	15.30	23.32	15.90	18.49
	Petugas Kesehatan	55.99	40.70	58.19	57.69	61.42
	Pengobatan Tradisional	3.04	1.12	1.94	1.05	1.84
	Dukun Bersalin	4.16	0.56	1.72	6.37	2.05

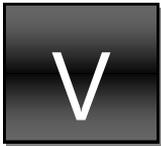
Sumber : BPS Kabupaten Lamongan

IV

Indikator Ketenagakerjaan

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penduduk Usia Kerja (15+ th)	906,179	899,237	917,856	922,451	925,621
2	Penduduk Usia Kerja (15+ th) Laki-Laki	432,311	428,775	438,391	440,801	442,532
3	Penduduk Usia Kerja (15+ th) Perempuan	473,868	470,462	479,465	481,650	483,089
4	Angkatan Kerja	618,831	634,002	611,621	633,048	621,196
5	Angkatan Kerja Laki-Laki	358,637	359,718	373,264	378,048	364,608
6	Angkatan Kerja Perempuan	260,194	274,284	238,357	255,000	256,588
7	Bekerja	588,025	602,281	585,311	607,096	599,071
8	Penduduk Laki-Laki Bekerja	341,558	344,015	357,401	365,009	351,563
9	Penduduk Perempuan Bekerja	246,467	258,266	227,910	242,087	247,508
10	Pencari Kerja	30,806	31,721	26,310	25,952	22,125
11	Penduduk Laki-Laki Pencari Kerja	17,079	15,703	15,863	13,039	13,045
12	Penduduk Perempuan Pencari Kerja	13,727	16,018	10,447	12,913	9,080
13	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,02	95,00	95,70	95,90	96,44
14	TKK Laki-Laki	95,24	95,63	95,75	96,55	96,55
15	TKK Perempuan	94,72	94,16	95,62	94,94	94,94
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,29	70,50	66,64	68,63	67,11
17	TPAK Laki-Laki	82,96	83,89	85,14	85,76	85,76
18	TPAK Perempuan	54,91	58,30	49,71	52,94	52,94
19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,98	5,00	4,30	4,10	3,56
20	TPT Laki-Laki	4,76	4,37	4,25	3,45	3,45
21	TPT Perempuan	5,28	5,84	4,38	5,06	5,06
22	Bekerja pada Sektor Pertanian	49,14	46,29	44,57	47,33	47,12
23	Bekerja pada Sektor Non Pertanian	50,86	53,71	55,43	52,67	52,88
24	Bekerja Status Berusaha	43,56	42,54	44,12	42,98	38,73
25	Bekerja Status Buruh/Pekerja Bebas	33,16	35,09	36,99	34,02	39,33
26	Bekerja Status Pekerja Keluarga	23,28	22,37	18,89	23,00	21,94
27	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Buruh/Karyawan	1,202,786	1,218,625	1,173,085	1,507,459	...
28	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	950,000	1,075,700	1,220,000	1,410,000	1,573,000

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan



Indikator Perumahan

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lantai Bukan Tanah	74.62	78.49	83.71	82.06	81.93
2	Atap Beton, Genteng, sirap, Seng, Asbes	99.89	100.00	99.91	100.00	100.00
3	Dinding Tembok dan Kayu	92.74	94.63	93.09	93.46	94.91
4	Rumah Tangga dengan Sumber air Minum Bersih	94.88	91.73	95.61	95.84	95.39
5	Rumah Tangga dengan Jamban Milik Sendiri dilengkapi Tangki Septik	87.88	90.49	94.32	93.50	94.94
6	Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik	99.84	99.91	99.80	100.00	100.00
7	Status Kepemilikan Rumah					
	Milik Sendiri	89.91	91.90	92.50	93.40	93.74
	Kontrak/Sewa	0.95	1.21	1.04	0.81	1.20
	Bebas Sewa	2.07	6.30	6.37	5.16	5.06
	Rumah Dinas	6.86	0.59	0.09	0.39	-
	Lainnya	0.22	-	-	0.24	-

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan



Indikator Kemiskinan

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Penduduk Miskin	197.90	192.00	186.10	183.60	176.92
2	Persentase Penduduk Miskin (P0)	16.70	16.18	15.68	15.38	14.89
3	Garis Kemiskinan (GK)	260,787	279,166	289,403	303.78	321,002
4	Kedalamam Kemiskinan (P1)	1.92	2.00	1.78	2.25	2.40
5	Keparahan Kemiskinan (P2)	0.36	0.40	0.36	0.58	0.66
6	Angka Melek Huruf Penduduk Miskin					
	Umur 15 - 24	98.26	98.72	100.00	100.00	100.00
	Umur 15 - 55	95.34	94.33	94.95	98.60	96.78
7	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin					
	7 - 12 Tahun	90.32	100.00	100.00	96.94	100.00
	13-15 Tahun	95.01	100.00	100.00	95.00	100.00
8	Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Miskin Usia 15 +					
	Tidak Tamat SD	27.05	31.77	28.70	35.02	31.62
	SD - SMP	54.15	51.45	47.87	45.73	51.54
	SMA Keatas	18.81	16.78	23.43	19.25	16.83
9	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas dan Status Bekerja					
	Tidak Bekerja	32.62	35.26	33.66	33.49	40.15
	Bekerja di Sektor Infomal	56.12	56.54	50.09	50.17	43.49
	Bekerja di Sektor Fomal	11.26	8.20	16.25	16.34	16.36
10	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas dan Sektor Bekerja					
	Tidak Bekerja	32.62	35.26	50.09	50.17	40.15
	Bekerja di Sektor Pertanian	56.12	43.05	40.06	39.38	34.04
	Bekerja di Sektor Non Pertanian	11.26	21.70	26.28	27.13	25.80
11	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Luas Lantai Perkapita,					
	Kurang dari 8 m2	9.51	7.98	10.58	9.16	11.18
	8 - 15 m2	42.56	31.21	39.44	35.71	30.29
	Lebih dari 15 m2	47.93	60.81	49.99	55.13	58.53
12	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih					
	Rumah Tangga Miskin	63.71	68.91	70.40	83.85	81.82
	Bukan Rumah Tangga Miskin	78.77	81.33	85.83	87.55	91.60
13	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama					
	Rumah Tangga Miskin	81.90	79.21	71.20	61.52	77.15
	Bukan Rumah Tangga Miskin	87.79	91.03	92.67	80.45	91.64
14	Persentase Pengeluaran Perkapita Untuk Makanan					
	Rumah Tangga Miskin	63.97	65.41	65.92	63.19	62.17
	Bukan Rumah Tangga Miskin	56.50	55.34	54.80	51.32	54.00

Sumber : BPS Kabupaten Lamongan

<https://lamongankab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

Jl. Basuki Rahmad 176 Lamongan

Telp./Fax. 0322-321339 Email : bps3524@bps.go.id